



DISKRESI DAN PARADIGMA

Sebuah Telaah Filsafat Hukum

PIDATO PENGUKUHAN

**Disampaikan Pada
Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

Semarang, 4 November 2010

**Oleh:
ERLYN INDARTI**

DISKRESI DAN PARADIGMA : Sebuah Telaah Filsafat Hukum

Erlyn Indarti

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada
Upacara Penerimaan Jabatan
Guru Besar dalam Filsafat Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Semarang, 4 November 2010



**DITERBITKAN OLEH
BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO
ISBN : 978.979.097.017.5**

SMILE

*Smile though your heart is aching
Smile even though it's breaking
When there are clouds in the sky, you'll get by*

*If you smile through your tears and sorrow
Smile and maybe tomorrow
You'll see the sun come shining through
For you*

*Light up your face with gladness
Hide every trace of sadness
Although a tear may be ever so near*

*That's time you must keep on trying
Smile what's the use of crying
You'll find that life is still worthwhile
If you just smile*

(Chaplin, Turner, dan Parsons)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang terhormat :

Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro

Sekretaris Senat Universitas Diponegoro

Para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro

Gubernur dan Muspida Provinsi Jawa Tengah, atau yang mewakili

Para Pejabat Sipil dan Militer

Para Pimpinan Kopertis Wilayah VI serta perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Para Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Pembantu Dekan, Ketua Bagian, Dosen dan Karyawan di Lingkungan Universitas Diponegoro

Segenap *civitas academica* di Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Undangan, Sejawat, Mahasiswa, Kerabat dan Handai Taulan, serta Hadirin sekalian

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankan saya mengajak para hadirin sekalian untuk pertamanya mengucapkan syukur ke hadapan Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam suasana yang berbahagia, dapat menghadiri Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro dalam rangka Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar.

Perkenankan pula saya dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada hadirin sekalian atas waktu yang diluangkan untuk hadir dalam upacara ini.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Filsafat Hukum yang berjudul :

**DISKRESI DAN PARADIGMA:
Sebuah Telaah Filsafat Hukum**

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia pada dasarnya senantiasa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi kehidupan. Dipicu oleh hasrat keingintahuan untuk memahami realitas kehidupan di sekelilingnya—serta semangat juang untuk memenuhi kebutuhannya—yang terus berubah, manusia mau tidak mau harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan guna mengantisipasi proses perubahan ini, dari waktu ke waktu manusia perlu menemukan landasan berpikir baru di dalam kerangka khasanah disiplin ilmiah yang ada. Dalam kaitan ini, salah satu landasan berpikir baru yang belum banyak digagas adalah di bidang filsafat, utamanya filsafat hukum.

Keterkaitan antara Filsafat dan Filsafat Hukum di antaranya dapat dilihat pada salah satu klasifikasi yang membagi filsafat menjadi 3 (tiga) bidang, yakni Filsafat Sistematis, Filsafat Khusus, dan Filsafat Keilmuan. Dalam hal ini Filsafat Hukum —bersama, antara lain, Filsafat Kebudayaan, Filsafat Pendidikan, Filsafat Politik, dan Filsafat Agama— termasuk ke dalam bidang Filsafat Khusus.¹ Klasifikasi yang lain membagi kecabangan filsafat ke dalam 11 (sebelas) bidang, seperti misalnya Filsafat Politik, Filsafat Agama, Filsafat Ilmu, Filsafat Pendidikan, dan Filsafat Hukum.²

Oleh karena hukum berkaitan dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia, dapat dimengerti jika klasifikasi yang lain lagi memasukkan Filsafat Hukum ke dalam apa yang disebut sebagai Filsafat Tingkah-laku atau Etika, yang adalah bagian dari Filsafat Manusia.³ Demikianlah, ditinjau dari sudut manapun, keterkaitan antara Filsafat dan Filsafat Hukum sebagaimana direpresentasikan melalui klasifikasi di atas, memang nyata adanya. Dalam hal ini, Filsafat Hukum lebih dipahami sebagai bagian dari

¹ T. L. Gie, *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Karya Kencana, 1977.

² J. S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 1985.

³ D. Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Filsafat, daripada bagian dari Ilmu Hukum. Kajian ilmiah di bidang Filsafat Hukum oleh karena itu mengikuti kaidah yang berlaku di lingkungan Filsafat.

Kembali kepada uraian awal di atas, perkembangan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebenarnya mensyaratkan adanya kegiatan penggagasan landasan berpikir baru. Melalui kegiatan penggagasan ini, diharapkan permasalahan yang tengah dikaji dapat terumuskan secara lebih baik, pertanyaan dapat tersusun secara lebih cermat, dan jawaban atas pertanyaan dimaksud dapat tersampaikan secara lebih tepat. Tanpa adanya hal ini maka Ilmu Pengetahuan pada umumnya, termasuk Filsafat Hukum pada khususnya, seolah akan 'jalan di tempat'.

Dengan adanya landasan berpikir yang baru, diharapkan cakrawala pengetahuan dapat semakin diperluas, pengetahuan yang ada dapat terus dimodifikasi, dan pengetahuan yang lebih baru selanjutnyapun dapat diupayakan untuk digagas pula. Semua ini dimaksudkan untuk membantu manusia agar dapat berselancar dalam era perubahan yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan, seperti yang tengah berlangsung di Indonesia belakangan ini, dengan aman dan sentosa.

Salah satu upaya pengembangan landasan berpikir baru sebagaimana disebutkan di atas adalah diadopsinya gagasan tentang 'paradigma'—yang diperkenalkan pertama kali ke pada 'sain' (*science*) oleh teoritisi fisika Thomas S. Kuhn di awal dekade 60-an⁴— ke dalam lingkup Filsafat yang telah berkembang selama ribuan tahun, termasuk kemudian Filsafat Hukum. Ibarat 'darah segar', kajian paradigmatis karenanya menjadikan Filsafat maupun Filsafat Hukum bagaikan mengalami proses 'peremajaan' atau 'rejuvenasi' kembali.

Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan dilihat sebagai suatu aktivitas yang diikat oleh tradisi dan preseden, yakni contoh kasus yang dapat dianggap sebagai otoritas pengambil keputusan atau

⁴ T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press, 1962.

dipergunakan sebagai 'justifikasi' bagi peristiwa serupa di kemudian hari. Lambat laun terbentuklah semacam model, percontohan, representatif, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, paradigma dapat dipahami sebagai sebuah *disciplinary matrix*, yakni suatu pangkal atau sumber sekaligus wadah, dari mana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula dan diharapkan akan terus mengalir.⁵ Mengikuti alur pikir ini, kontribusi ilmu pengetahuan melalui paradigma di masa depan dengan demikian diletakkan di dalam kerangka apa yang telah dicapai di masa lalu. Dari sinilah pengertian tentang paradigma sesungguhnya bermula dan selanjutnya berkembang luas.

Hadirin yang saya muliakan

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian '*belief* dasar' atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan '*belief* dasar' atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya].⁶ Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma juga akan, di antaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Ini berarti, makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kombinasi, gabungan, atau campuran dari komitmen yang dianut dan diterapkan oleh anggota-anggota suatu komunitas ilmu pengetahuan secara bersama-sama, yang, untuk waktu tertentu, menawarkan model permasalahan berikut pemecahannya kepada komunitas dimaksud.

⁵ T. S. Kuhn, *loc. Cit.*

⁶ N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage Publications, Inc., 1994.

Sementara itu, salah satu perdebatan dalam lingkup Ilmu Hukum yang paling mengemuka dan terus saja berlangsung tiada berkesudahan hingga kini adalah mengenai bagaimana hukum itu sendiri semestinya dibaca lalu diterapkan atau ditegakkan. Sebagian pakar, praktisi, dan pengamat hukum berpendapat bahwa hukum seharusnya dibaca dan diterapkan atau ditegakkan apa adanya, tanpa penafsiran yang menurut mereka cenderung melibatkan penilaian yang justru mengaburkan pesan awalnya. Namun demikian, tidak sedikit pula yang justru berkeyakinan sebaliknya, yakni bahwa selalu ada ruang untuk menimbang-nimbang dan menafsir hukum, lebih daripada sekedar apa yang terbaca di permukaan. Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan tentang penafsiran dimaksud sebenarnya akan lebih komprehensif bila dipahami sebagai persoalan yang berkisar mengenai sejauh manakah 'diskresi' dapat digunakan. Diskresi dikatakan lebih mencakup di sini karena tidak hanya berkenaan dengan pembacaan atau penafsiran, melainkan juga lanjut hingga penerapan dan penegakan hukum pada umumnya.

Demikianlah, perbedaan dalam memahami apa yang disebut sebagai 'diskresi' ini pada dasarnya bukanlah perbedaan sederhana yang bersifat dikotomis. Ada pola perbedaan pendapat mengenai diskresi —dengan 'nuansa' perbedaan yang halus— yang bersifat kontinum di antara sekalian para pakar, praktisi, dan pengamat hukum yang ada. Satu-satunya jalan agar gradasi perbedaan tersebut dapat dirasakan, adalah dengan meninjau, sekaligus meletakkan, seluruh permasalahan ini di dalam konteks filsafat hukum, utamanya melalui kajian paradigmatis.

Untuk keperluan tersebutlah pidato pengukuhan⁷ ini disusun. Mengikuti kaidah Metodologi Penelitian Filsafat, dalam hal ini Model Penelitian Komparasi, benang merah di antara Filsafat Hukum, paradigma, dan diskresi ditelusuri dengan menggunakan kajian literatur.⁷ Hal ini dilakukan dengan pertama-tama membandingkan berbagai aliran Filsafat Hukum pada ranah paradigma.

Melalui kajian paradigmatis, aliran Filsafat Hukum yang ada —yang pada dasarnya adalah *belief* dasar atau *worldview* itu— akan

⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997.

dapat dirunut lalu dipilah ke dalam ontologi, epistemologi, serta metodologi. Dari sinilah baru kemudian pengertian yang baik dan benar mengenai derajat perbedaan yang ada di antara sekalian para pakar, praktisi, dan pengamat hukum dalam memahami dan menggunakan diskresi dapat dicapai. Jika tidak, maka jurang pemisah di antara berbagai aliran Filsafat Hukum yang menganga itu akan menjadikan persoalan hukum bagai tak kunjung terselesaikan. Komparasi paradigmatik karenanya diperlukan, sebab diyakini lebih mampu mengurai, mendudukan pada tempatnya, serta memecahkan kompleksitas persoalan hukum, termasuk dalam hal ini perdebatan tentang diskresi.

Di dalam pidato pengukuhan ini, pertimbangan dikedepankannya diskresi antara lain adalah karena perdebatan tentang diskresi, termasuk penafsiran hukum, di lingkungan pemerhati dan penegak hukum memang sangat mengemuka belakangan ini. Diskresi dijadikan contoh juga karena persoalan diskresi berjangkit di semua lingkungan penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, maupun hakim. Bahkan, diskresi pada galibnya melekat pada semua pengambil keputusan. Selain itu, pembahasan tentang diskresi sangat signifikan karena diskresi diperlukan untuk sejauh mungkin membumikan telaah filsafati yang sifatnya 'abstrak' itu ke ranah yang lebih 'real'.

Akan tetapi, perlu kiranya disadari bahwa betapapun pembumian ini dilakukan, tidak lantas dapat menjadikan tinjauan Filsafat maupun Filsafat Hukum 'konkrit'. Diskresi dengan demikian dapat dipandang sebagai garis batas 'arena bermain' telaah filsafati. Dalam memahami diskresi, tinjauan Filsafat Hukum akan melihat asas, alasan, atau pertimbangan mengapa penggunaan diskresi berlangsung sebagaimana adanya. Di luar ini adalah ranah kajian Ilmu Hukum yang lebih bersifat 'empiris' atau 'nyata', semacam Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Sosiologi Hukum, dan lain sebagainya, yang kajiannya lebih ke arah [cara] penggunaan diskresi itu sendiri.

Membaca uraian di atas, kiranya dapat diidentifikasi permasalahan utama yang mendorong disusunnya pidato pengukuhan ini, yakni :

Bagaimanakah kajian paradigmatis dapat memberikan kontribusi bagi Filsafat Hukum dalam membangun pemahaman tentang diskresi, berikut penggunaannya ?

Memperhatikan permasalahan tersebut, maka tujuan dari pidato pengukuhan ini dengan demikian adalah:

Menguraikan bagaimana kajian paradigmatis dapat memberikan kontribusi bagi Filsafat Hukum dalam membangun pemahaman tentang diskresi, berikut penggunaannya.

Hadirin yang saya hormati

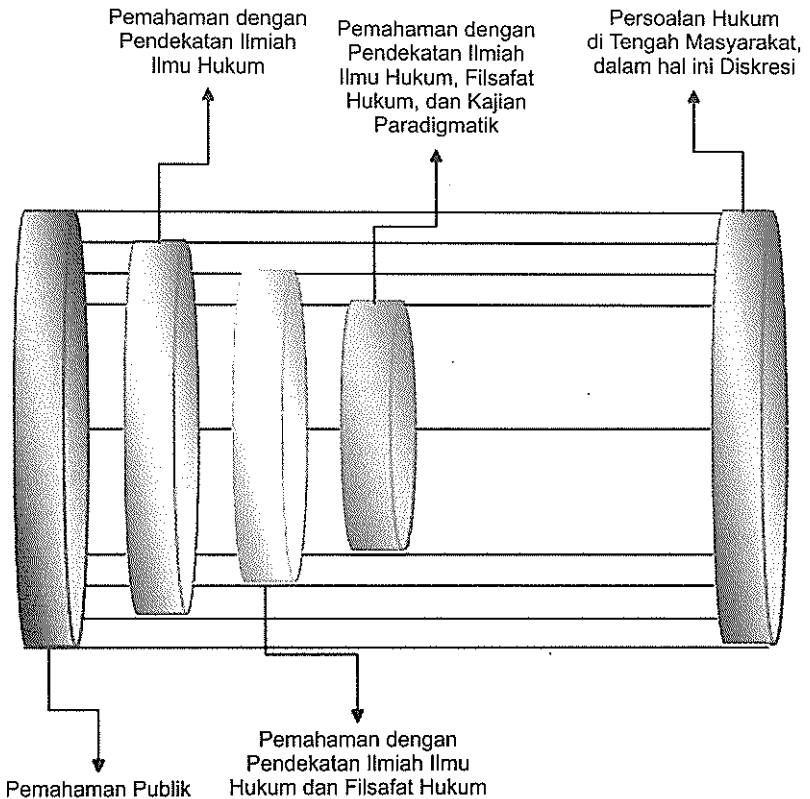
Filsafat Hukum pada dasarnya berintikan terutama pembahasan tentang berbagai aliran Filsafat Hukum. Uraian tentang paradigma di dalam pidato pengukuhan ini karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang nuansa atau gradasi perbedaan pemahaman mengenai diskresi berikut penggunaannya di antara berbagai aliran Filsafat Hukum, yang dipilah ke dalam pola yang ada sesuai dengan paradigma masing-masing. Dengan perbandingan yang lebih luas melalui kajian paradigmatis ini, akan dapat dilihat sebenarnya seberapa jauhkah ataupun seberapa dekatkah perbedaan di antara beragam aliran Filsafat Hukum tersebut. Lebih jauh lagi, prasangka dan jurang pemisah yang selama ini membentang di antara sekalian aliran Filsafat Hukum menyangkut diskresi dan penggunaannya diharapkan dapat terkikis dan terjembatani.

Adapun proposisi yang menjiwai kerangka pemikiran pidato pengukuhan ini kiranya dapat dijabarkan sebagai berikut.

"Kajian paradigmatis memungkinkan Filsafat Hukum untuk menelusuri perbedaan yang ada di antara beragam aliran Filsafat Hukum berkenaan dengan — untuk kemudian membangun pemahaman tentang— diskresi berikut penggunaannya secara lebih rinci, halus, dan tajam."

Berdasarkan proposisi di atas, maka kerangka pemikiran yang akan memandu pembahasan pidato pengukuhan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

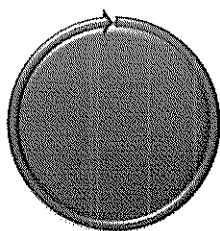


Gambar di atas mengibaratkan setiap ragam pemahaman tentang persoalan hukum di tengah masyarakat, pada umumnya, maupun diskresi, pada khususnya, sebagai layaknya sebuah lensa.

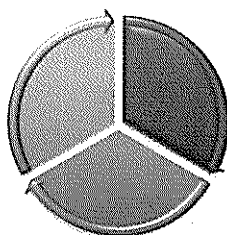
Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, rinci, halus, dan tajam, diperlukan lapisan demi lapisan lensa. Dimulai dengan 'lensa' Pemahaman Publik yang melihat persoalan hukum secara naif; diikuti oleh 'lensa' Pemahaman Ilmu Hukum yang menyoroti persoalan hukum secara lebih ilmiah; dilanjutkan dengan 'lensa' Pemahaman Filsafat Hukum yang menelaah persoalan hukum secara lebih dalam sekaligus luas; dan akhirnya 'lensa' Pemahaman Kajian Paradigmatik yang menelusuri persoalan hukum secara lebih rinci, halus, serta tajam.

Selanjutnya ilustrasi bagaimana sumbangan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik secara lebih rinci membangun pemahaman persoalan hukum di tengah masyarakat dapat dilihat di bawah ini.

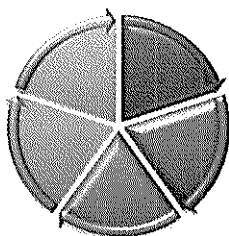
Gambar 2. Ilustrasi Sumbangan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik bagi Pemahaman Persoalan Hukum di Tengah masyarakat secara Lebih Rinci



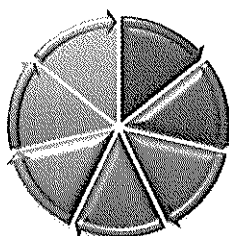
Pemahaman Publik



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah
Ilmu Hukum



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah
Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan
Kajian Paradigmatik

Gambar tersebut meng-ilustrasi-kan betapa publik memahami persoalan hukum secara sederhana. Dengan pendekatan ilmiah Ilmu hukum, persoalan hukum terlihat tidak lagi tunggal. Bila didukung dengan Pemahaman Filsafat Hukum, maka persoalan hukum dapat ditelaah secara semakin beragam. Akhirnya, melalui Pemahaman Kajian Paradigmatik dapat ditelusuri secara lebih rinci.

Adapun berikut ini adalah ilustrasi bagaimana sumbangan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik dapat secara lebih halus dan tajam membangun pemahaman persoalan hukum di tengah masyarakat.

Gambar 3. Ilustrasi Sumbangan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik bagi Pemahaman Persoalan Hukum di Tengah masyarakat secara Lebih Halus dan Tajam



Pemahaman Publik



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah Ilmu Hukum



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum



Pemahaman dengan Pendekatan Ilmiah Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik

Gambar di atas membayangkan bahwa pemahaman publik tentang persoalan hukum ternyata masih buram. Melalui pendekatan ilmiah Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, dan Kajian Paradigmatik, maka pemahaman persoalan hukum menjadi semakin halus dan tajam.

B. FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM

1. Filsafat

Hadirin yang saya hormati

Filsafat —yang bisa dianggap terjemahan dari kata '*philosophie*'— di antaranya dapat dimaknai sebagai 'cinta kepada ilmu'⁸, 'suka kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan'⁹, atau 'cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup'¹⁰. Pada tataran teknis, Filsafat¹¹ lebih diartikan sebagai 'cinta akan kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional'¹². Filsafat atau '*philosophie*' juga dapat dipahami sebagai 'usaha untuk memperoleh [ilmu] pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan [ilmu] pengetahuan itu sendiri'¹³.

Apa yang dipikirkan Filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian. Karenanya, metoda yang khas bagi suatu pemikiran Filsafat ialah refleksi atas pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tentang sesuatu hal dalam cakrawala yang universal. Oleh sebab sifatnya yang universal ini, obyek Filsafat mencakup segala hal yang dialami manusia. Dalam hal ini, memikirkan sesuatu hal secara filsafati ialah mencari arti yang sebenarnya dari hal dimaksud dengan memandangnya dari cakrawala yang paling luas.¹⁴ Ini artinya, secara sederhana sebenarnya bisa dikatakan bahwa 'berfilsafat adalah berpikir'.

Namun demikian, tidak semua kegiatan 'berpikir' itu dapat dikatakan sebagai 'berfilsafat'. Hanya kegiatan 'berpikir tentang hakikat segala sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan

⁸ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 1991.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ T. Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995.

¹¹ Mahadi, *loc. cit.* dan Hasbullah Bakry, *loc. cit.* cenderung menyebut 'Filsafat' sebagai 'Falsafah'.

¹² T. Huijbers, *loc. cit.*

¹³ Mahadi, *loc. cit.*

¹⁴ T. Huijbers, *loc. cit.*

'mendalam'lah yang bisa disebut sebagai 'berfilsafat'.¹⁵ Filsafat juga senantiasa mengandung makna 'penyelidikan' di dalamnya; yakni 'penyelidikan' dalam rangka mencari tahu tentang sifat asli dari dunia, sifat yang sedalam-dalamnya dari dunia, serta sifat yang sebenarnya dari hidup itu sendiri.¹⁶

2. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum lebih dipahami sebagai bagian dari Filsafat, khususnya Filsafat Moral atau Etika, daripada bagian dari Ilmu Hukum. Karena itu, Filsafat Hukum merupakan Filsafat tentang kesusilaan yang baik dan yang buruk. Pada saat bersamaan, Filsafat Hukum adalah juga Filsafat mengenai keadilan sekaligus mengenai ketidak-adilan.¹⁷

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Filsafat pada dasarnya memiliki ciri khas, yakni hanya membahas permasalahan yang sifatnya umum. Mengikuti jalan pikiran yang sama, obyek pembahasan filsafat hukum dengan demikian adalah bagian yang paling umum dari hukum. Ini berarti filsafat hukum bukan semata-mata mengenai hukum 'ini' atau hukum 'itu' —misalnya saja hukum Belanda atau Hukum Romawi—, bukan pula tentang Hukum Pidana atau Hukum Perdata saja; melainkan berkenaan dengan hukum seluruhnya.¹⁸ Kesimpulan-kesimpulan filsafat hukum dengan demikian berlaku umum bagi setiap hukum. Dalam hal ini, apa yang berlaku bagi hukum dengan sendirinya berlaku pula bagi Hukum Belanda dan Hukum Romawi, atau bagi Hukum Pidana dan Hukum Perdata, atau bagi hukum apapun itu.

Secara sederhana kiranya dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang Filsafat, yakni Filsafat Tingkah Laku atau Etika, yang mempelajari 'hakikat hukum'.¹⁹ Selain hakikat hukum, Filsafat

¹⁵ Mahadi, *loc. cit.*

¹⁶ C.C.J. Webb, *Geschiedenis der Wijsbegeerte*, Assen, 1952, di dalam Mahadi, *loc. cit.*

¹⁷ L. Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, Bandung : Remadja Karya CV, 1984.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ D. Darmodiharjo dan Shidarta, *loc. cit.*

Hukum juga mempermasalahkan alasan terdalem dari eksistensi hukum —seperti misalnya tujuan, subyek, dan pembuatnya— serta sifat-sifat hukum itu sendiri.²⁰

Inti dari Filsafat Hukum terletak diantaranya pada pembahasan tentang berbagai aliran²¹ Filsafat Hukum. Tumbuh dan berkembangnya berbagai aliran dalam Filsafat Hukum pada dasarnya mencerminkan pergulatan pemikiran yang terus saja berkelanjutan dalam Bidang Hukum.

Dengan mempelajari pokok-pokok aliran Filsafat Hukum, diharapkan dapat ditelusuri dinamika dari berbagai ragam pemikiran tentang hukum. Lain daripada itu, akan dapat pula terkuak kompleksitas hukum dengan beraneka sudut pandangnya. Masing-masing aliran Filsafat Hukum hadir dengan hakikat maupun tujuan hukum-nya sendiri-sendiri.²² Aliran Filsafat [Hukum] tidak sama dengan 'paradigma'. Setiap aliran Filsafat [Hukum] sebenarnya merupakan bagian —dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar— dari suatu 'paradigma' tertentu.

C. PARADIGMA

Hadirin yang saya muliakan

Kata Paradigma atau *paradigm* itu sendiri sesungguhnya diturunkan dari kata campuran, gabungan, atau amalgamasi dari bahasa Yunani *paradeigma*. Dalam hal ini *para* berarti 'di sebelah', 'di samping', 'di sisi', 'berdampingan', atau 'di tepi', sedangkan *deiknunai* atau *deigma* bermakna 'melihat' atau 'menunjukkan'. Di dalam bahasa Inggris, secara semantis dan sederhana, *paradigm*

²⁰ L. Rasjidi, *loc. cit.*

²¹ Sementara pakar menyebutnya sebagai 'madzab'; dalam hal ini, tiap-tiap Aliran atau Madzab Filsafat Hukum sebenarnya me-representasi-kan suatu *basic belief* atau *world view* tertentu.

²² D. Darmodiharjo dan Shidarta, *loc. cit.*

atau 'paradigma' kemudian dimaknakan sebagai 'contoh' (*example*), 'pola' (*pattern*)²³, atau 'model'²⁴.

Di dalam komunitas ilmiah, pemahaman tentang paradigma merupakan masalah yang jauh lebih kompleks. Paradigma antara lain dipandang sebagai keseluruhan konsep yang diterima oleh sebagian besar anggota suatu komunitas intelektual sebagai sebuah 'sain' (*science*), dikarenakan ke-efektif-annya di dalam menjelaskan suatu proses, ide, atau sekumpulan data yang kompleks²⁵. Di dalam disiplin tertentu, seringkali paradigma diberi makna khusus. Di bidang antropologi, misalnya, paradigma diartikan sebagai suatu model teoretis yang menjelaskan sebuah tipe perilaku sosial²⁶.

Selain itu, paradigma dapat dipahami sebagai suatu 'kerangka' [pemikiran] yang meliputi beragam *belief* dan standar; kerangka mana lalu menetapkan ruang lingkup dari segala hal yang dianggap 'sah' dalam suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan di dalam mana paradigma dimaksud diaplikasikan.²⁷ Secara keseluruhan, apa yang terkandung di dalam paradigma dengan demikian mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah yang mapan dan mantap bagi komunitas ilmuwan yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan terjadi pula proses yang sebaliknya; di mana pola ini juga mendefinisikan bagaimana isi dan bentuk dari komunitas ilmuwan yang berbagi paradigma yang sama tersebut.²⁸

Pada beberapa kasus, paradigma dianggap serupa dengan 'pendekatan' (*approach*) maupun 'tradisi'. Dalam kaitan ini, paradigma diartikan sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan *research*. Di sini paradigma merupakan keseluruhan sistem berpikir atau *system of thinking* yang antara lain meliputi : asumsi dasar, [research] *question* yang harus dijawab atau semacam

²³ Australian National Dictionary Centre, Oxford: *The Australian Reference Dictionary* (Melbourne: Oxford University Press, 1992).

²⁴ *Webster's New World Dictionary – Third College Edition*.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Collins Dictionary of Anthropology*. (Glasgow : HarperCollinsPublishers, 1991).

²⁷ A.F. Chalmers, *What is This Thing Called Science ?*, (St. Lucia : University of Queensland Press, 1982).

²⁸ R.J. Johnston et.al. (eds.), *The Dictionary of Human Geography, Second Edition*, (Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1986).

teka-teki [ilmiah] yang hendak dipecahkan, berbagai teknik atau metoda penelitian yang akan diterapkan, serta beraneka contoh tentang bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dan benar itu.²⁹

Dari sudut pandang yang berbeda, paradigma dapat dimengerti sebagai sekumpulan 'proposisi' yang menguraikan dan menggariskan bagaimana 'dunia' ini dilihat, dipahami, dan akhirnya diterima. Paradigma mengandung satu set *worldview* atau sistem *belief*, yakni suatu cara melalui mana kompleksitas dunia ini dipecah/dipilah agar mudah dimengerti. Secara umum paradigma menggariskan bagi penganutnya apa yang penting, apa yang sah, dan apa yang masuk akal.³⁰

Dalam konteks uraian di atas, paradigma adalah suatu 'kerangka' [pemikiran] yang meliputi beragam *belief* dan standar. Kerangka ini menetapkan ruang lingkup dari segala hal yang dianggap 'sah' dalam suatu bidang ilmu, didiplin, atau cabang ilmu pengetahuan di mana paradigma tersebut diaplikasikan.³¹ Apa yang terkandung di dalam paradigma, mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah yang mapan dan mantap bagi komunitas ilmuwan yang bersangkutan.³²

Dari sudut pandang yang lain lagi, paradigma ternyata juga disejajarkan dengan 'perspektif' (*perspective*)³³. Berkenaan dengan hal ini, sementara pakar ternyata berkeberatan terhadap pendapat dimaksud. Keberatan mereka didasarkan pada pertimbangan bahwa perspektif pada dasarnya belum mempunyai kemapanan dan kemantapan yang setara dengan paradigma. Ini dikarenakan perspektif dibangun oleh sistem *belief* yang kurang atau belum terlalu berkembang bila dibandingkan dengan sistem *belief* yang ada pada sebuah paradigma. Akibatnya, komponen-komponen penyusun

²⁹ W.L. Neuman, *Social Research Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1991).

³⁰ M.Q. Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, (Newbury Park, CA: Sage, 1990).

³¹ A.F Chalmers, *What is Thing Called Science?*, St. Lucia: University of Queensland Press, 1982.

³² R.J Jhonston et.al (eds.), *The Dictionary of Human Geography, Second Edition*, Oxford : Basil Blackwaell Ltd., 1986.

³³ S. Sarantakos, *Social Research*, (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty.Ltd., 1993).

sistem *belief* dari suatu perspektif masih dapat saling dipertukarkan dengan unsur-unsur sistem *belief* dari perspektif yang lain.³⁴

Dalam maknanya yang luas, paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set' *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya]. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set *belief* 'dasar' tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/ penggunaanya pada *world view* tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.³⁵

Membaca berbagai pendapat para pakar tentang makna sebenarnya dari paradigma, secara garis besar terdapat 2 (dua) pengertian mengenai hal ini. Pengertian pertama lebih mengedepankan makna global dari paradigma. Dalam kaitan ini paradigma dapat disejajarkan dengan 'matriks disiplin [atau bidang ilmu]' (*disciplinary matrix*). Pengertian ini cenderung bersifat merengkuh semua komitmen bersama yang berlaku di dalam suatu kelompok [baca: komunitas] ilmiah tertentu. Pada tataran ini, paradigma bagaikan 'jumlah dari bagian-bagian yang ada' (*the summation of the parts*) serta mencakup keseluruhan muatan yang termaktub di dalamnya, seperti beragam hukum, beraneka teori, berbagai model, dan lain sebagainya.

Adapun Pemahaman kedua melihat paradigma secara lebih fundamental dan lokal, serta cenderung mengisolasi komitmen tertentu yang dianggap penting di dalam sebuah kelompok ilmiah, seperti misalnya salah satu hukum, teori, maupun model. Dengan kata lain pemahaman kedua ini bisa dianggap 'bagian' (*subset*) dari pengertian pertama. Mereka yang tergabung ke dalam kelompok ini

³⁴ E.G. Guba dan Y.S. Lincoln, 'Competing paradigm in qualitative research', di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994).

³⁵ N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *loc. cit.*

cenderung merujuk kepada paradigma sebagai semacam 'eksemplar' (*exemplar*).

Menurut penulis, sejalan dengan pengertian pertama dari paradigma tersebut, secara tipikal paradigma mendefinisikan bagi penganut atau pemakainya, baik disadari maupun tidak, apa yang dapat dianggap/diterima sebagai bidang, disiplin, atau cabang ilmu pengetahuan yang digeluti sekaligus bagaimana cara mereka mewujudkan karya dan karsa mereka di dalamnya. Pada tataran inilah berbagai konsep paradigma yang lebih formal disadari, direnungkan dan diperdebatkan. Dalam kaitan ini, ilmu hukum, ilmu sosial, atau bidang ilmu lainnya, sebenarnya bisa dianggap 'multi-paradigmatik', yakni merefleksikan interpretasi berbagai pokok persoalan dari bidang-bidang ilmu dimaksud secara majemuk, bervariasi, bahkan tidak jarang berseberangan.

Makna pertama dari paradigma yang bersifat global di atas selanjutnya menjabarkan paradigma sebagai sebuah konsep—seringkali diasumsikan atau dianut begitu saja tanpa disadari—yang memungkinkan seseorang atau sekelompok masyarakat [katakanlah masyarakat ilmiah, begitu] untuk melihat dan memahami dunia dengan segala isinya. Dengan demikian, paradigma sesungguhnya adalah bukan pikiran (*thought*) yang kita miliki, melainkan kerangka [berpikir] (*framework*) di mana pikiran kita dibentuk dan dibangun.

Dalam pengertian tersebut, paradigma sebenarnya dapat dikiasikan bagai 'alat/perkakas mental' (*mental tools*) yang kita gunakan tiap-tiap kali kita [mencoba] memahami berbagai situasi dan kondisi yang telah, tengah, atau kelak akan kita hadapi.³⁶ Pendeknya, paradigma merupakan konsensus dari suatu komunitas ilmiah; dan bisa dibilang ia merupakan satu set pemecahan masalah (*problem solutions*) yang kongkrit yang pada akhirnya diterima oleh profesi yang bersangkutan³⁷.

³⁶ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Tenth Edition.

³⁷ Hoyningen-Huene (1993), di dalam, K. Cunningham, *Web Dictionary of Cybernetics and Systems*.

Dari sekian banyak pakar yang mencoba menyodorkan pemahaman berkait klasifikasi paradigma, penulis cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln yang menurut penulis lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Mereka, yang pada dasarnya lebih condong kepada pengertian global dari paradigma itu, membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) 'pertanyaan mendasar' yang menyangkut³⁸ :

- bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini [disebut sebagai pertanyaan 'ontologis'];
- sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini [disebut sebagai pertanyaan 'epistemologis', ke dalam mana termasuk pula pertanyaan 'aksiologis']; dan
- cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat [tentunya termasuk peneliti] mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tersebut [disebut sebagai pertanyaan 'metodologis'].

Selain dibedakan berdasar tiga pertanyaan mendasar tadi, paradigma-paradigma yang diajukan oleh Guba dan Lincoln juga bervariasi satu sama lain menurut posisi yang mereka ambil manakala dihadapkan dengan 9 (sembilan) *issue* praktis. Kesembilan *issue* praktis tersebut adalah³⁹ :

- tujuan penelitian [tentunya dalam kasus penelitian];
- sifat dan makna/kandungan pengetahuan;
- akumulasi pengetahuan;
- kriteria kualitas;
- nilai;
- etika;
- peran penganut/pemegang;
- pelatihan; dan
- keterkaitan.

³⁸ E.G. Guba dan Y.S. Lincoln (1994).

³⁹ *Ibid.*

Dalam konteks pengertian paradigma yang lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional inilah Guba dan Lincoln menawarkan 4 (empat) paradigma utama. Keempat paradigma dimaksud adalah : *positivism*; *postpositivism*; *critical theory et al*; dan *constructivism* [d/h *naturalistic inquiry*]. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respon terhadap 3 (tiga) pertanyaan mendasar; yang meliputi pertanyaan 'ontologis', 'epistemologis', dan 'metodologis'. Berikut ini adalah 'Set *Basic Belief*' dari keempat paradigma utama yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln tersebut (Tabel 1), berikut posisi mereka relatif terhadap 9 (sembilan) *issue* praktis seperti telah disinggung di atas⁴⁰ (Tabel 2):

Tabel 1. Set *Basic Belief* 4 (empat) Paradigma Utama

Pertanyaan	Positivisme	Postpositivisme	<i>Critical Theory et al</i>	Konstruktivisme
Ontologi	Realisme Naif :	Realisme Kritis :	Realisme Historis :	Relativisme :
	realitas eksternal, objektif, <i>real</i> , dan dapat dipahami.	realitas eksternal, objektif, dan <i>real</i> yang dipahami scr tidak sempurna.	realitas 'virtuasi' yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan 'gender'.	realitas majemuk & beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individual, lokal, dan spesifik.
Epistemologi	Dualis / Objektivis :	Modifikasi Dualis / Objektivis :	Transaksional / Subjektivis :	Transaksional / Subjektivis :
	peneliti dan objek investigasi adalah dua <i>entily</i> independen; bebas nilai.	dualisme surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu; eksternal objektivitas.	peneliti dan objek investigasi terkait scr interaktif; temuan di-'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak.	peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di-'cipta' / di-'konstruksi' bersama.
Metodologi	Eksperimental / Manipulatif :	Modifikasi Eksperimental / Manipulatif :	Dilogis / Dialektikal	Hermeneutikal / Dialektikal
	uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesis; manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metoda kuantitatif.	falsifikasi dengan cara <i>critical multipiam</i> atau modifikasi 'triangulasi'; utilisasi teknik kualitatif: <i>setting</i> lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang <i>emic</i> .	ada dialog antara peneliti dengan objek investigasi, bersifat dialektikal, men-'transform' kemasyarakatan dan kesalah-pahaman menjadi kesadaran untuk mendoorak.	'konstruksi' ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi, dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal 'konstruksi' diinterpretasi; tujuan : distilasi / konsensus / resultant.

Sumber : Guba dan Lincoln (1994)

⁴⁰ E.G. Guba dan Y.S Lincoln, *Competing paradigms in qualitative research*, di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage Publications Inc., 1994.

Tabel 2. Posisi 4 (empat) Paradigma Utama terhadap Beberapa Issue Praktis

Issue	Positivisme	Postpositivisme	Critical/Theory et. al.	Konstruktivisme
Tujuan Investigasi	Eksplanasi, yakni prediksi dan kontrol terhadap fenomena; kriteria progres: prediksi dan kontrol yang semakin baik		Kritik – transformasi struktur sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis dan gender yang membatasi dan mengeksploitasi manusia melalui konfrontasi dan (bila perlu) konflik; kriteria progres: restitusi dan emansipasi yang berkesinambungan	Understanding dan rekonstruksi terhadap konstruksi yang ada; konsensus/resultante konstruksi yang tetap terbuka thd interpolasi baru ketika informasi dan 'sosisifikasi' berkembang; kriteria progres: konstruksi yang lebih <i>informed / sophisticated</i>
Sifat dan Makna/Kandungan Pengetahuan	Hipotesa yang telah di verifikasi dan diterima sebagai fakta atau hukum	Hipotesa yang tidak dapat difalsifikasi dan mungkin bisa dianggap sebagai fakta atau hukum	Serangkalan wawasan struktural/historis tentang hukum yang bert-transformasi sejalan dengan tergantikannya kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman oleh wawasan hukum yang lebih kaya informasi melalui interaksi dialektis.	Konstruksi dengan konsensus/resultante relatif; konstruksi yang majemuk dan beragam dapat 'keoksis'; revisi berkelanjutan; rekonstruksi terjadi manakala beragam konstruksi (sejalan dengan informasi dan solistifikasi) berada pada <i>juxtaposition</i> di dalam konteks dialektikal
Akumulasi Pengetahuan	Akresi (tumbuh bertahap) setiap fakta (termasuk yang mungkin) adalah <i>building block</i> bagi 'bangunan pengetahuan' yang terus tumbuh, generalisasi dan hubungan sebabakibat untuk prediksi dan kontrol		Pengetahuan tumbuh dan berubah melalui proses dialektik seiring dengan revisi historis yang menyingkirkan kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman sekaligus memperluas wawasan	Konstruksi yang semakin <i>informed</i> dan <i>sophisticated</i> melalui proses hermeneutikal dan dialektikal manakala beragam konstruksi berada pada <i>juxtaposition</i>
Kriteria Kualitas	Berlandas pada ontologi realisme, validitas internal (<i>isomorphism</i> antara temuan dengan kenyataan); validitas eksternal (<i>generalizability</i>); <i>reliability</i> (dalam arti stabilitas); dan objektivitas (penganut/pemegang pada posisi netral dan berjarak terhadap yang diobservasi/di-investigasi)		Ke-situasian historis (faktor sosial, politis, budaya, ekonomis, etnis dan gender), seberapa jauh stimulus terhadap aksi, terkikisnya kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman, serta transformasi struktural	Kriteria <i>trustworthiness</i> : kredibilitas, transferabilitas, <i>dependability</i> , dan <i>confirmability</i> ; kriteria <i>authenticity</i> ontologis (mengembangkan konstruksi personal), edukatif (memahami konstruksi yang lain), katalitis (menstimulasi aksi), dan taklis (memberdayakan aksi)
Nilai	<i>Value free</i> /bebas nilai: ditiadakan/ditolak		<i>Value bounded</i> / nilai diakui/dihargai: formatif	
Etika	Ekstrinsik, <i>ethical behavior</i> di-'polis' secara formal; oleh mekanisme eksternal; condong pada desepsi		Intrinsik; pencerahan / kesadaran moral	Intrinsik; kesadaran akan proses, problem khusus
Peran Penganut/Pemegang	Pakar dengan <i>special privilege</i> , ilmuwan yang <i>disinterested</i> dan <i>distant</i> ; <i>informer</i> bagi pembuat keputusan/kebijakan <i>darchango agent</i>		Instigator [& fasilitator] <i>transformative intellectual</i> , 'advokat' & aktivis	<i>Passionate participant</i> ; fasilitator rekonstruksi <i>multivoice</i> ; serta <i>orchestrator</i>
Pelatihan	Teknis dan kuantitatif; teori substantif	Teknis; kuantitatif dan kualitatif; teori substantif	Re-sosialisasi, kualitatif dan kuantitatif, sejarah nilai-nilai <i>altruism</i> dan pemberdayaan	
Keterkaitan	<i>Commensurable</i> : semua paradigma dapat dikomparasi titik-demi-titik dan diakomodasi		<i>Incommensurable</i> : komparasi titik-demi-titik antar paradigma adalah <i>irrelevant</i> , <i>theory relative</i>	

Sumber : Guba dan Lincoln (1994)

1. Paradigma Positivisme

Hadirin yang saya hormati

Dengan memperhatikan sekaligus menerapkan uraian sebelumnya, utamanya tentang paradigma di atas, maka kiranya dapat dipahami bahwa dalam naungan paradigma positivisme, Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology* serta aliran Filsafat Hukum *Natural Law*, memahami hukum sebagai *law as what ought to be in moral or ideal precepts*, di mana hukum adalah apa yang seharusnya di dalam ajaran / prinsip / aturan moral atau ideal. Dalam bahasa yang lain, hukum bagi aliran ini dipahami atau dimaknai sebagai *ius Constituendum*, yakni 'hukum yang dicita-citakan'. Di sini hukum dicirikan sebagai asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam. Adapun keadilan bagi kelompok aliran ini sebenarnya masih belum terwujud dan karenanya perlu untuk terus-menerus diupayakan agar akhirnya dapat terwujud. Aliran-aliran Filsafat Hukum ini bekerja dengan basis norma moral pada ranah normatif normologik.⁴¹

Sementara itu, bagi Aliran Filsafat Hukum *Legal Positivism*, hukum dimaknai sebagai *law as what it is written in the books*, yakni kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* di suatu waktu / tempat tertentu. Bisa dikatakan, aliran ini memahami atau memaknai hukum sebagai *ius Constitutum*, yaitu 'hukum yang ada dan berlaku'. Bagi aliran ini, hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif legeslatif dari ranah normatif positif.⁴²

⁴¹ E. Indarti, 2007. 'Komparasi Berbagai Aliran Filsafat Hukum : Suatu Kajian Filsafat Hukum'. Laporan Penelitian. Majalah Ilmiah FH Unissula, Jurnal Hukum, Vol. XVII, No. 3, September 2007.

⁴² Lihat H. McCoubrey dan N.D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London : Blackstone Press Limited, 1993.

Membaca uraian singkat ini, dapat dilihat bahwa ontologi Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology*, *Natural Law*, serta *Legal Positivism* adalah realisme naif. Dengan ini hukum adalah realitas eksternal yang bersifat objektif, *real*, dan dapat dipahami secara penuh. Epistemologinya bisa dibayangkan adalah dualis dan objektivis, di mana hukum dipahami secara objektif sebagai suatu *entity* yang bebas nilai, serta yang diposisikan 'di luar' —atau bukan bagian dari— manusia itu sendiri. Sedangkan metodologi dari aliran ini agaknya adalah eksperimen atau manipulasi empiris. Hukum cenderung diteliti melalui uji empiris —yang meliputi verifikasi *research question*, hipotesa, dan kontrol terhadap kondisi yang berlawanan— dengan menggunakan metoda kuantitatif.⁴³

Penelitian hukum —utamanya penelitian yang bersifat empirik— dalam konteks Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology*, *Natural Law*, serta *Legal Positivism*, mempunyai tujuan berupa 'eksplanasi' atau penjelasan berkenaan dengan bagaimana hukum dapat memprediksi sekaligus mengontrol berbagai fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat. Bagi kelompok aliran ini, kemajuan atau 'progres' dikatakan tercapai manakala prediksi dan kontrol tersebut menjadi semakin baik.

Di sini pengetahuan hukum pada dasarnya dimaknai sebagai —atau mengandung— hipotesa mengenai hubungan sebab-akibat, guna memprediksi dan mengontrol fenomena sosial dimaksud, yang telah diverifikasi serta yang kemudian diterima sebagai fakta hukum. Dengan bergulirnya waktu, sejalan dengan generalisasi serta semakin terkumpulnya fakta hukum, pengetahuan hukum lalu tumbuh secara bertahap (akresi). Ini dikarenakan setiap fakta hukum sejatinya adalah *building block* bagi 'bangunan' pengetahuan hukum yang terus tumbuh.

Sesuai dengan ontologinya yang realisme naif itu, kualitas temuan penelitian hukum menurut Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology*, *Natural Law*, serta *Legal Positivism*, diuji melalui kriteria :

⁴³ Lihat E.G. Guba dan Y.S Lincoln, *loc. cit.*

- validitas internal, yakni *isomorphism* atau keserupaan antara temuan dengan kenyataan;
- validitas eksternal atau *generalizability*;
- *reliability* dalam arti stabilitas, dan;
- objektivitas.

Dalam hal ini, penganut aliran-aliran tersebut —dengan demikian juga termasuk para penelitiannya maupun hukum itu sendiri— berada pada posisi netral terhadap masyarakat sebagai pihak yang diteliti. Mereka mempunyai semacam *special privelege* dan biasanya bersikap bagai ilmuwan yang ‘tidak mempunyai ketertarikan’ (*disinterested*), maupun ‘mempunyai jarak’ (*distanced*), terhadap masyarakat, baik sebagai objek penelitian maupun objek hukum itu sendiri. Ini berarti, hukum diyakini ‘bebas nilai’ atau *value free*. Karenanya dapat dimaklumi jika penelitian sekaligus pelatihan diselenggarakan secara teknis, kuantitatif, serta teori substantif.⁴⁴

Membaca uraian di atas, kiranya layaklah jika Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology*, *Natural Law*, serta *Legal Positivism*, masuk ke dalam Paradigma Positivisme.

2. Paradigma Pos Positivisme

Seraya bergeser menjauh dari posisi aliran-aliran di atas, Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism* melihat hukum sebagai *law as it is made by the judge in the court of law*. Dengan kata lain, hukum dimengerti sebagai *judge-made law*. Sebagaimana aliran-aliran sebelumnya, Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism* memaknai hukum sebagai *ius Constitutum* pula, yaitu ‘hukum yang ada dan berlaku’.

Secara umum hukum dicirikan dengan keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses peradilan. Dasar dari aliran-aliran yang bergerak pada ranah normatif behavioral ini adalah norma positif yudisial.⁴⁵ Bisa dikatakan dengan demikian hukum merupakan hasil cipta penuh pertimbangan (*judgement*) dari hakim pengadil.

⁴⁴ E. Indarti, *loc. cit.*

⁴⁵ Lihat R. Wacks, *Jurisprudence*, London : Blackstone Press Limited, 1995.

Yang sangat menarik adalah, ciri hukum seperti ini sungguh sebangun dengan pemahaman apa yang disebut sebagai 'diskresi'.

Selanjutnya adalah Aliran Filsafat Hukum *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law* yang beranjak tidak terlalu jauh dari Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*. Pada umumnya keempat aliran ini memandang hukum sebagai *law as it is in society*. Dalam pandangan ini, hukum karenanya diterima sebagai *law as regularities*. Sebagai sesuatu yang berlangsung secara regular, dengan sendirinya hukum lantas dipadankan layaknya pola perilaku sosial. Tatkala pola ini semakin mapan, hanya soal waktu sebelum akhirnya hukum diartikan lebih jauh oleh keempat aliran tersebut sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat. Kerja hukum sebagai institusi sosial ini berlangsung baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yg baru. Dengan Pemahaman hukum seperti diuraikan di atas, kiranya pantas bila aliran-aliran dimaksud diposisikan pada ranah empirik normologik.⁴⁶

Di sini segera dapat diketahui bahwa ontologi dari Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*, *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law*, sebenarnya ialah realisme kritis. Hukum menurut kelompok aliran ini merupakan realitas eksternal yang bersifat objektif dan *real*, serta yang hanya dapat dipahami secara tidak sempurna. Epistemologi aliran-aliran ini sebenarnya merupakan modifikasi —sehingga masih belum terlalu jauh beringsut— dari epistemologi Paradigma Positivisme seperti disebutkan di atas yang adalah dualis dan objektivis itu. Namun dalam kasus kelompok aliran ini, objektivitas —utamanya eksternal objektivitas— menjadi kriteria penentu sebuah hukum, sedangkan dualisme antara hukum dan manusia semakin surut perannya.⁴⁷

⁴⁶ Lihat R.L. Abel (Ed.), *The Law and Society Reader*, New York : New York University Press, 1995.

⁴⁷ E. Indarti, *loc. cit.*

Selanjutnya metodologi aliran-aliran ini secara umum masih mengadopsi metodologi eksperimental dan manipulatif terhadap hukum yang ada, namun sudah mengalami modifikasi. Sehubungan dengan hal ini, uji empiris terhadap hukum diselenggarakan melalui falsifikasi dengan cara *critical multiplism* atau modifikasi 'triangulasi'. Metodologi ini juga mulai memanfaatkan teknik-teknik kualitatif, termasuk *setting* yang lebih natural, informasi yang lebih situasional, dan penerapan cara pandang *emic*.⁴⁸

Sama dengan kelompok aliran yang termasuk ke dalam Paradigma Positivisme, penelitian hukum —utamanya penelitian yang bersifat empirik— dalam konteks Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*, *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law* bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat memprediksi sekaligus mengontrol berbagai fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Senada dengan penjelasan sebelumnya tentang Paradigma Positivisme, pengetahuan hukum bagi kelompok aliran ini dimaknai sebagai —atau mengandung— hipotesa mengenai hubungan sebab-akibat, guna memprediksi dan mengontrol fenomena sosial yang mengemuka di masyarakat. Perbedaannya adalah, bila Aliran Filsafat Hukum *Legal Philosophy* atau *Legal Theology*, *Natural Law*, serta *Legal Positivism* bertumpu pada 'verifikasi', maka kelompok Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*, *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law* berpijak pada 'falsifikasi'. Dalam hal ini, fakta hukum bagi kelompok aliran ini adalah 'bukan' hipotesa yang telah diverifikasi, melainkan hipotesa yang tidak lagi dapat difalsifikasi. Baru kemudian, setelah digeneralisasi, fakta hukum ini menjadi bagian dari pengetahuan hukum. Oleh karena setiap fakta hukum dapat diibaratkan layaknya *building block* bagi 'bangunan' pengetahuan hukum, maka seiring dengan semakin terkumpulnya fakta hukum, pengetahuan hukum pun selanjutnya tumbuh secara bertahap (akresi).

⁴⁸ Lihat E.G. Guba dan Y.S Lincoln, *loc. cit.*

Seperti halnya kelompok aliran yang tergabung ke dalam Paradigma Positivisme yang berlandaskan ontologi realisme naif itu, kualitas temuan penelitian hukum menurut Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*, *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law*, diukur berdasarkan kriteria :

- validitas internal, yakni *isomorphism* atau keserupaan antara temuan dengan kenyataan;
- validitas eksternal atau *generalizability*;
- *reliability* dalam arti stabilitas, dan;
- objektivitas.

Serupa dengan penjelasan sebelumnya, baik para penganut aliran-aliran ini, peneliti, maupun hukum itu sendiri, bersikap netral terhadap masyarakat. Dengan *special privelege* yang ada pada mereka, para ilmuwan dalam kelompok aliran ini memilih untuk 'tidak mempunyai ketertarikan' (*disinterested*), maupun 'mempunyai jarak' (*distanced*), terhadap masyarakat, baik sebagai objek penelitian maupun objek hukum itu sendiri. Dengan demikian, bagi aliran-aliran ini, hukum dianggap 'bebas nilai' atau *value free*. Konsekuensinya, penelitian ataupun pelatihan di dalam lingkup kelompok aliran ini dilaksanakan secara teknis, kuantitatif yang didukung oleh kualitatif, serta teori substantif. Ciri-ciri seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa Aliran Filsafat Hukum *Legal Realism* atau *Legal Behavioralism*, *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structuro-Functionalism*, *Law and Society*, serta *Sociology of Law* dapat digolongkan ke dalam Paradigma Pos-positivisme.

Dengan mengikuti pengelompokan beberapa aliran filsafat hukum ke dalam 4 (empat) paradigma utama sebagaimana telah dijabarkan oleh E.G. Guba dan Y.S Lincoln (1994) di depan, seraya mengembangkan pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto (2000), tentang Bahan Kuliah Penulisan Disertasi, saya menyajikan komparasi paradigmatis beberapa aliran Filsafat Hukum yang termaktub ke dalam paradigma positivisme dan pos-positivisme di bawah ini.

Tabel 3. Komparasi Paradigmatik Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Paradigma Positivisme dan Pos-Positivisme

Paradigma	Aliran	Pemahaman / Makna Hukum	Ciri Hukum	Rasah
Positivisme Ontologi : realisme naïf Metodologi : dualis / objektivis Epistemologi : eksperimental / manipulatif	<i>Legal Philosophy / Theology, Natural Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Law as what ought to be in moral or ideal precepts</i> • <i>Ius constituendum.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam; • Keadilan yang [masih] harus diwujudkan. 	Normatif normologik [Norma moral]
	<i>Legal Positivism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Law as what it is written in the books;</i> • <i>Ius constitutum.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaidah-kaidah positif yang berlaku umum <i>in abstracto</i> di suatu waktu / tempat tertentu; • Terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; • Hukum perundang-undangan nasional / negara; • Perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya. 	Normatif positif [Norma positif legeslatif]
Pospositivisme Ontologi : realisme kritis Metodologi : modifikasi dualis / objektivis Epistemologi : modifikasi eksperimental / manipulatif	<i>Legal Realism/ Behavioralism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Law as it is made by the judge in the court of law or judge-made law;</i> • <i>Ius constitutum.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan yang yang diciptakan hakim <i>in concreto</i> dalam proses peradilan; • Hasil cipta penuh pertimbangan (<i>judgement</i>) dari hakim pengadil. 	Normatif behavioral [Norma positif yudisial]
	<i>Legal Structuralism / Functionalism/ Structure-Functionalism, Law and Society, Sociology of Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Law as it is in society ;</i> • <i>Law as regularities.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola perilaku sosial; • Institusi sosial yang nyata & fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan keterlibatan dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarah dan pembentukan pola perilaku yg baru. 	Empirik nomologik

Sumber : E. Indarti. 2005a (Dikembangkan dari Guba dan Lincoln, 1994 dan Wignjosoebroto, 2000)

3. *Critical Theory et. al.*

Hadirin yang saya hormati

Berpindah jauh dari posisi berbagai aliran di atas, Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence* juga memaknai hukum sebagai *law as historical or virtual realities*, di mana hukum adalah kenyataan 'virtual' atau sejarah. Dengan makna ini, aliran-aliran dimaksud memahami atau meyakini hukum secara virtual atau sejarah (*law as historically or virtually understood or believed*). Karenanya, bagi mereka hukum

pada dasarnya adalah kesadaran yang tidak benar atau, dengan kata lain, disadari secara salah (*law as false consciousness or as falsely realised*).

Ini berarti, di mata ketiga aliran yang berkibrah pada ranah hukum empirik kritis tersebut, hukum merupakan serangkaian struktur—sebagai suatu realitas *virtual* atau historis— yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Pada saat bersamaan hukum bagi mereka adalah instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif dan eksploitatif. Sebagai konsekuensi, setiap saat hukum semestinya terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi, guna menuju emansipasi.⁴⁹

Yang menarik, ontologi aliran-aliran ini pada dasarnya masih termasuk ontologi realisme. Namun di sini, berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya, realisme mereka adalah realisme historis. Maksudnya adalah, bagi kelompok aliran ini, hukum merupakan realitas 'virtual' yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan 'gender'. Selanjutnya, aliran-aliran ini ber-epistemologi-kan transaksional / subjektivis; di mana manusia, kelompok manusia, dan institusi—dalam hubungannya dengan hukum— terkait satu sama lain secara interaktif. Dalam hal ini, pembuatan, pembentukan, atau pembangunan, bahkan penegakan hukum berangkat dari semacam proses 'mediasi' atau 'transaksi' di antara sekalian nilai—yang tentunya bersifat subjektif— yang dipegang oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ada yang perlu digaris-bawahi di sini, batas antara ontologi dan epistemologi menjadi kabur. Menurut Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence*, hukum selanjutnya dibuat, dibentuk, dibangun, dan ditegakkan melalui metodologi dialogis atau dialektikal. Di sini berlangsung 'dialog' di antara para pembuat hukum, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dialog tersebut bersifat 'dialektikal', yaitu "men-

⁴⁹ Lihat H. Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur : International Law Book Services, 1994.

'transform' kemasabodohan dan kesalah-pahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak ketimpangan atau penindasan".⁵⁰

Dalam meneliti atau meng-investigasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence* bertujuan untuk melontarkan kritik terhadap kemapanan semu dalam rangka mentransformasi struktur sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis, dan 'gender' [baca: hukum] yang membatasi dan mengeksploitasi masyarakat itu sendiri. Pada banyak kasus hal ini dilasanakan melalui konfrontasi. Bahkan, bilamana perlu, kelompok aliran ini tidak ragu untuk memilih jalur konflik guna menyampaikan maksud sekaligus mewujudkan cita-cita mereka. Bagi aliran-aliran ini, progres atau kemajuan atau perubahan baru dapat tercapai ketika hukum yang mereka perjuangkan menjamin berlangsungnya restitusi dan emansipasi secara berkesinambungan.

Pengetahuan hukum, bagi Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence*, adalah serangkaian wawasan struktural/historis tentang hukum yang bertransformasi sejalan bergulirnya waktu. Transformasi dimaksud terjadi tatkala kemasabodohan dan kesalah-pahaman telah tergantikan oleh wawasan hukum yang lebih kaya informasi melalui interaksi dialektis. Dalam hal ini, pengetahuan hukum tumbuh melalui proses dialektis yang berlangsung seiring dengan revisi historis dalam rangka menyingkirkan kemasabodohan dan kesalah-pahaman serta memperkaya wawasan hukum masyarakat dengan informasi yang valid.

Sementara itu, kualitas hukum, menurut Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence*, ditakar dengan ke-situasi-an historis (faktor sosial, politis, budaya, ekonomis, etnis dan gender). Kualitas hukum juga diukur berdasarkan seberapa jauh stimulus terhadap aksi, terkikisnya kemasabodohan dan kesalah-pahaman, serta terjadinya transformasi struktural.

⁵⁰ Lihat E.G. Guba dan Y.S Lincoln, *loc. cit.*

Memperhatikan tataran di atas, kiranya dapat dimaklumi jika kajian maupun penelitian hukum di dalam kelompok aliran ini mengusung etika secara intrinsik dengan visi pencerahan moral, sehingga bersifat *value bounded* atau 'mengakui / menghargai nilai'. Dengan digunakannya ukuran-ukuran tersebut dapat dimengerti pula bila pakar, praktisi, peneliti/investigator/ *reseracher*, maupun pemerhati hukum di dalam kelompok aliran ini berlaku sebagai instigator sekaligus fasilitator perubahan, *transformative intellectual*, penyedia 'advokasi', dan aktivis. Untuk merengkuh aliran-aliran ini, karenanya, diperlukan pelatihan yang berkenaan dengan resosialisasi, tradisi penelitian kualitatif yang didukung kuantitatif, sejarah, nilai-nilai *altruism*, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan segala karakteristik di atas, tak ayal lagi sekalian aliran tersebut layak digolongkan ke dalam Paradigma *Critical Theory et.al.*

4. Paradigma Konstruktivisme

Terus bergeser lebih jauh meninggalkan kelompok besar paradigma positivistik, Aliran-Aliran Filsafat Hukum *Legal Interpretivism* dan *Legal Symbolic Interactionism* masing-masingnya memahami hukum sebagai *law as interpretations or processes of interpreting* dan *law as it is in human actions and interactions*. Secara umum, hukum bagi kedua aliran ini merupakan makna-makna simbolik hasil interpretasi [baik individual maupun kolektif] sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi serta interaksi masyarakat. Adapun ranah hukum di mana kedua aliran ini bekerja adalah interpretif atau simbolik interaksional.⁵¹

Perjalanan pergeseran paradigmatik ini akhirnya sampai pada Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*. Menurut pandangan aliran ini, hukum adalah *law as relative and contextual consensus*. Maksud dari ungkapan ini adalah, hukum pada dasarnya merupakan kesepakatan —baik tertulis maupun tidak— yang bersifat relatif dan kontekstual. Karena hukum adalah kesepakatan,

⁵¹ *Ibid.*

maka kiranya dapat dipahami jika aliran ini memahami hukum sebagai *law as mental construction* sekaligus sebagai *law as experiential realities*.

Artinya, hukum bagi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* sejatinya adalah konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, *intangible*, lokal, dan spesifik —walaupun elemen-elemen serupa dapat saja dijumpai pada individu, kelompok masyarakat, maupun budaya yang berbeda—. Konstruksi mental tersebut dibangun melalui pengalaman kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, hingga ke kehidupan antar-negara.

Selanjutnya aliran ini meyakini bahwa rekonstruksi, revisi, atau perubahan terhadap hukum terjadi secara berkesinambungan, sejalan dengan pengayaan informasi dan 's sofistifikasi' atau 'olah cipta-rasa' sekalian manusia itu sendiri. Jadi, [hukum] yang ada, sebenarnya adalah konsensus, kesepakatan, atau resultante relatif di antara berbagai pemahaman, pendapat, atau opini mengenai persoalan yang tengah dihadapi, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Itulah sebabnya mengapa dikatakan aliran ini beroperasi pada ranah relatif konstruktivis.⁵²

Sebenarnya, Aliran-Aliran Filsafat Hukum *Legal Interpretivism* dan *Legal Symbolic Interactionism* mempunyai ontologi, epistemologi, dan metodologi yang berbeda dari berbagai aliran sebelumnya; dan sepertinya hendak membentuk paradigma sendiri yang terpisah. Dalam kaitan ini, setidaknya ada 2 (dua) catatan yang perlu disimak. Pertama, *worldview* atau *belief* yang membentuk ontologi, epistemologi, dan metodologi tersebut masih *loose* serta dapat dipertukarkan satu-sama-lain. Karenanya, kesatuan ontologi, epistemologi, dan metodologi tidak cukup kokoh atau *solid* untuk mewujudkan paradigma, dan hanya dapat membangun sebuah *perspective*.

Kedua, berpijak pada catatan pertama tersebut, belakangan ini, masyarakat ilmiah di mancanegara mulai menggeser Aliran-Aliran

⁵² *Ibid.*

Filsafat Hukum *Legal Interpretivism* dan *Legal Symbolic Interactionism* lebih jauh ke ujung spektrum aliran dan bergabung dengan Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*. Ini dibuktikan dengan dimasukkannya penghulu Aliran-Aliran Filsafat Hukum *Legal Interpretivism*, yaitu Ronald Dworkin, sekarang ini ke dalam Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*.⁵³

Secara tidak langsung sesungguhnya telah tergambar di atas bahwa ontologi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* adalah relativisme. Dengan ontologi ini, *Legal Constructivism* memaknai hukum sebagai realitas yang majemuk sekaligus beragam. Dalam hal ini, hukum terbentuk berdasarkan pengalaman sosial-individual yang sejatinya bersifat lokal dan spesifik. Serupa dengan epistemologi Aliran Filsafat Hukum *Critical Legal Theory*, *Critical Legal Studies*, dan *Feminist Jurisprudence*, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, epistemologi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* juga transaksional atau subjektif. Epistemologi ini memposisikan manusia, kelompok manusia, dan institusi—dalam hubungannya dengan hukum—sedemikian rupa sehingga di antara mereka berlangsung interaksi yang intensif lagi ekstensif.

Bedanya dengan kelompok aliran sebelumnya adalah, bagi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* hukum dibuat, dibentuk, atau dibangun serta ditegakkan—dengan kata lain ‘dicipta’ atau ‘di-konstruksi’—secara bersama-sama oleh semua pihak yang berkepentingan, tanpa menafikan subjektivitas masing-masing. Seperti sebelumnya, dalam Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* ini, antara ontologi dan epistemologi juga seperti tidak ada pembatasnya. Adapun metodologi pembuatan, pembentukan, pembangunan, atau penegakan hukum dalam Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* adalah hermeneutikal dan dialektikal.

Dengan demikian, ‘konstruksi’ [baca: hukum] umum ditelusuri melalui interaksi di antara sekalian pembuat dan penegak hukum, maupun masyarakat luas sebagai obyek hukum, yang pada dasarnya juga

⁵³ Lihat E.G. Guba dan Y.S Lincoln, *loc. cit.*

mengusung 'konstruksi' [baca: hukum] -nya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dengan menerapkan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal, tiap-tiap 'konstruksi' [baca: hukum] tersebut diinterpretasi. Tujuan seluruh proses ini —baik itu pembuatan maupun penegakan hukum— pada akhirnya adalah tercapainya distilasi, konsensus, atau resultante di antara berbagai 'konstruksi' [baca: hukum] yang asalnya berbeda-beda tersebut tersebut.⁵⁴

Dalam pada itu, penelitian atau investigasi terhadap hukum dan/atau permasalahan yang dihadapi masyarakat di dalam Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* bertujuan untuk 'memahami' (*understanding*) hukum di dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian atau investigasi diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Namun demikian, konsensus/ resultante konstruksi hukum tetap terbuka terhadap interpretasi baru manakala informasi dan 'sofistikasi' berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, kriteria kemajuan atau progres bagi aliran ini adalah konstruksi hukum yang lebih *informed / sophisticated*.

Bagi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*, hukum adalah sebuah kesepakatan atau konsensus. Dalam kaitan ini, pengetahuan hukum dengan demikian adalah konstruksi dengan konsensus/resultante yang bersifat relatif. Di sini, konstruksi yang majemuk dan beragam dapat 'koeksis' atau 'hidup berdampingan'. Kendati demikian, bagi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*, revisi terhadap tiap-tiap konstruksi yang ada akan berlangsung secara berkelanjutan. Revisi, yang sejatinya adalah rekonstruksi ini, terjadi manakala beragam konstruksi [sejalan dengan informasi dan sofistikasi] berada pada *juxtaposition* di dalam konteks dialektikal. Sebagai konsekuensi, akumulasi pengetahuan hukum di dalam aliran ini terjadi manakala sebuah konstruksi hukum menjadi semakin *informed* dan *sophisticated* melalui proses hermeneutikal dan dialektikal.

Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* mengukur kualitas [pengetahuan] hukum dengan kriteria :

⁵⁴ *ibid.*

- *trustworthiness* :
 - kredibilitas,
 - transferabilitas,
 - *dependability*, dan
 - *conformability*,
- *authenticity* :
 - ontologis (mengembangkan konstruksi personal),
 - edukatif (memahami konstruksi yang lain),
 - katalitis (men-stimulasi aksi), dan
 - taktis (memberdayakan aksi).

Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* juga mengusung etika secara intrinsik dengan dipandu oleh kesadaran akan proses serta adanya problem khusus di setiap lokasi penelitian. Serupa dengan kelompok aliran di dalam Paradigma *Critical Theory et. al.*, Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism* juga bersifat *value bounded* atau 'mengakui / menghargai nilai'. Dengan adanya ukuran-ukuran tersebut, maka pakar, praktisi, peneliti/observer/investigator/researcher, maupun pemerhati hukum di dalam aliran ini dipandang sebagai *passionate participant*, fasilitator rekonstruksi *multivoice*, sekaligus *orchestrator*. Sama persis pula dengan kelompok aliran sebelumnya, untuk mengadopsi Aliran Filsafat Hukum *Legal Constructivism*, dibutuhkan pelatihan yang berkenaan dengan resosialisasi, tradisi penelitian kualitatif yang didukung kuantitatif, sejarah, nilai-nilai *altruism*, serta pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya masih mengikuti pengelompokan beberapa aliran filsafat hukum ke dalam 4 (empat) paradigma utama sebagaimana telah dijabarkan oleh E.G. Guba dan Y.S Lincoln (1994) di depan seraya mengembangkan pemikiran Soetandyo Wignjosebroto, (2000) tentang Bahan Kuliah Penulisan Disertasi, saya menawarkan komparasi paradigmatis beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Paradigma *Critical Theory et.al.* dan Paradigma Konstruktivisme berikut ini.

Tabel 4. Komparasi Paradigmatik Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Paradigma *Critical Theory et.al.* dan Paradigma Konstruktivisme

Paradigma	Aliran	Pemahaman / Makna Hukum	Ciri Hukum	Ranah
<i>Critical Theory et.al.</i> Ontologi : realisme historis Metodologi : transaksional / subjektif Epistemologi : dialogis/dialektikal	<i>Critical Legal Theory, Critical Legal Studies, Feminist Jurisprudence</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Law as historical / virtual realities; • Law as historically / virtually understood or believed; • Law as false consciousness or as falsely realised. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serangkaian struktur, sebagai suatu realitas virtual atau historis, yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama; • Sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif dan eksploitatif; • Setiap saat terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi, guna menuju emansipasi. 	Empirik kritis
Konstruktivisme Ontologi : relativisme Metodologi : transaksional / subjektif Epistemologi : hermeneutikal / dialektikal	<i>Legal Interpretivism / Symbolic Interactionism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Law as it is in human actions and interactions; • Law as interpretations or processes of interpreting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Makna-makna simbolik hasil interpretasi [individual ataupun kolektif] sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi serta interaksi masyarakat. 	Simbolik interaksional / interpretif
	<i>Legal Constructivism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Law as relative and contextual consensus (Hukum sebagai kesepakatan, relatif dan kontekstual, baik tertulis maupun tidak); • Law as mental construction; • Law as experiential realities. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, intangible, lokal, dan spesifik [walaupun elemen serupa dapat dijumpai pada individu, kelompok masyarakat, maupun budaya yang berbeda]; berbasis sosial / experiential; • Rekonstruksi / revisi / perubahan terjadi berkesinambungan, sejalan dengan pengayaan informasi dan 'solistikasi' atau 'olah dipta-rasa'; • Yang ada, setiap saat, adalah konsensus atau kesepakatan relatif berkenaan dengan konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. 	Relatif konstruktivis

Sumber : E. Indarti. 2005a (Dikembangkan dari Guba dan Lincoln, 1994 dan Wignjosoebroto, 2000)

D. DISKRESI

Hadirin yang saya muliakan

Baik ketika dibuat maupun ketika digunakan, hukum tidak dapat terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun para penggunaanya.

Karenanya, pembuatan, penerapan atau penegakan hukum yang betul-betul terbebas dari campur tangan rasa, suasana batin, dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin.

Sulit pula membayangkan hukum yang sungguh-sungguh *sterile*, murni dan bersih dari segala bentuk penerjemahan atau penafsiran oleh para penegak hukum —sebagai bagian dari masyarakat yang memang diberi mandat untuk itu— ketika mereka menegakkannya. Sebab hal ini bukanlah semata-mata ketrampilan cocok-mencocokkan, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang, antara segala bentuk pelanggaran dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum itu sendiri bukan merupakan tujuan akhir. Hukum hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir yang lebih baik dalam kehidupan manusia, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, serta kemerdekaan sejati. Hukum adalah instrumen kontrol sosial yang sangat dibutuhkan. Hukum menjadi 'hidup' melalui upaya masyarakat untuk menafsirkan dan memahaminya dan melalui cara bagaimana mereka menggunakan sekaligus menegakkan-nya.

Hukum tidak dapat mencakup seluruh situasi dan kondisi yang harus dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Secara umum bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan atau pembuatan hukum agaknya memang tidak dimaksudkan untuk bisa mengatasi atau menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh anak manusia. Dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu tempat ke tempat lain, ada saja persoalan yang tak tercakup oleh hukum yang berlaku. Penegakan seluruh hukum yang ada-pun [yang hanya dapat menjawab sebagian saja dari seluruh permasalahan umat manusia itu] dapat dikatakan sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Kuantitas —dan barangkali juga kualitas— sumber-daya, yakni para penegak hukum yang seringkali terbatas, merupakan salah satu alasannya.

Ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat, kemerdekaan

dan otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirinya memungkinkannya untuk [biasanya secara perseorangan] mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda secara bijaksana dan penuh pertimbangan, yakni:

1. **membaca** kasus atau permasalahan tersebut dengan baik,
2. pada saat bersamaan **menerjemahkan** hukum yang ada secara komprehensif, ini utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa langsung dilakukan begitu saja secara 'hitam-putih',
3. pada kebanyakan kasus yang lain, seringkali diperlukan untuk **menafsirkan** hukum yang telah diterjemahkan tersebut secara lebih lanjut.

Ketiga pekerjaan bagian pertama tersebut, yakni pembacaan kasus atau permasalahan serta penerjemahan dan/atau penafsiran hukum lalu dibenturkan satu sama lain. Pekerjaan yang selanjutnya harus dilakukan adalah:

4. **memilah** baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang telah diterjemahkan dan/atau ditafsirkan tersebut, dan
5. **memilih** atau **menetapkan pilihan**.

Demikianlah dua lagi pekerjaan bagian kedua yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh seorang penegak hukum ketika berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan. Adapun dua pekerjaan bagian ketiga atau terakhir yang segera menyusul penetapan pilihan di atas adalah:

6. **membuat** suatu keputusan atau kesimpulan, dan/atau
7. **mengambil** tindakan atau langkah tertentu.

Dalam hal penegakan hukum, keputusan yang telah dibuat dan/atau tindakan yang telah diambil tersebut bisa saja bermuara pada diterapkannya hukum tertentu. Akhirnya, yang perlu ditekankan adalah bagaimanapun jua, berbagai pekerjaan yang beragam tersebut melibatkan akuntabilitas dari individu penegak

hukum yang bersangkutan terhadap organisasinya maupun terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian, bagi seorang penegak hukum, di dalam pelaksanaan tugasnya, keputusan yang dibuat atau langkah apapun yang diambil pada dasarnya telah melalui suatu 'pertimbangan profesional' yang relatif ketat. Keseluruhan rangkaian proses yang berlangsung di dalam suatu ruang-gerak yang cukup luas inilah yang dikatakan sebagai 'diskresi'. Adapun langkah atau keputusan yang diambil tersebut merupakan hasil 'diskresi'.

Perlu digaris-bawahi, adalah tidak mungkin untuk menyiapkan semacam buku panduan atau buku *manual* yang memuat tentang detil teknis pelaksanaan diskresi secara umum. Situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk dan beragam-lah yang menjadi sebab utama. Daya baca, daya terjemah dan/atau tafsir, serta daya pilih dan pilih dari satu penegak hukum ke penegak hukum lainnya juga sangat bervariasi.

Oxford: the Australian Reference Dictionary (1992) mengartikan diskresi atau *discretion* sebagai :

"kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) [seseorang] untuk bertindak (*act*) sesuai dengan penilaian / pertimbangan (*judgment*)-[nya]".

Collins Dictionary and Thesaurus (1991) sementara itu memberikan pengertian diskresi atau *discretion* yang sedikit berbeda, yakni :

"kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) [seseorang] untuk membuat keputusan / kesimpulan (*judgments*) dan untuk bertindak (*act*) sebagaimana ia pandang tepat [atau 'pas', pantas, patut, atau cocok]".

Selanjutnya, pengertian kata benda *discretion* menurut '*Kamus Inggris – Indonesia*' karangan John M. Echols dan Hassan Shadily (2000) adalah seperti berikut ini :

“kebijaksanaan, keleluasaan atau [kebebasan untuk menentukan atau memilih] ”.

Memperhatikan paparan di atas, setidaknya dapat di-identifikasi 8 (delapan) unsur —berikut segala makna turunannya— yang terkandung di dalam pengertian diskresi, yaitu⁵⁵ :

- kemerdekaan,
- otoritas atau kewenangan,
- kebijaksanaan,
- pilihan,
- keputusan,
- tindakan,
- ketepatan.

Akhirnya, dengan memformulasikan kedelapan unsur di atas, diskresi secara komprehensif bisa dirumuskan sebagai⁵⁶ :

“kemerdekaan dan/atau otoritas [seseorang / sekelompok orang / suatu institusi] untuk —secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal— membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan [tertentu] yang di-pandang paling tepat ”.

Hadirin yang saya hormati

Pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan di atas pada dasarnya merupakan ujung dari suatu rangkaian proses yang sebenarnya panjang, walaupun pada kenyataannya bisa saja berlangsung hanya dalam sekejap. Proses dimaksud, sebagaimana disinggung sebelumnya, melibatkan curahan kebijaksanaan yang dalam hal ini termuat pula kehati-hatian yang berpijak pada intelektualitas atau ke-cendekiawan-an yang memadai. Proses tersebut juga melibatkan pertimbangan atau penilaian dari segala

⁵⁵ E. Indarti. 2000. *Diskresi Kepolisian*. (Semarang: Badan Penerbit Undip).

⁵⁶ *Ibid*

sudut pandang secara adil. Barulah kemudian sampai pada pilihan yang berkenaan dengan pembuatan keputusan dan/atau pengambilan tindakan tertentu. Dalam hal penegakan hukum, misalnya, keseluruhan proses ini dapat dipahami sebagai rangkaian upaya⁵⁷ :

- menelaah kasus yang dihadapi,
- membaca ketentuan [hukum] yang ada,
- menafsirkan ketentuan dimaksud lebih lanjut,
- memilih ketentuan yang ada sesuai dengan kebutuhan, dan
- memilih atau menetapkan pilihan, yakni dalam hal:
- membuat suatu keputusan hukum, dan
- mengambil langkah atau tindakan hukum tertentu.

Dengan demikian, secara sederhana diskresi dapat dipahami sebagai⁵⁸ :

"kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, antara lain, menafsir ketentuan hukum yang ada, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat". Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal dimaksud terletak pada penafsir —misalnya saja penyidik—, serta dilakukan secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan.

Sementara itu, secara salah kaprah kata diskresi cenderung direduksi maknanya dan diartikan semata-mata sebagai tindakan yang diambil. Pada-hal tindakan yang diambil sebenarnya merupakan hasil atau produk dari diskresi, bukan diskresi itu sendiri. Kesalahan ini antara lain berpangkal pada kenyataan bahwa tindakan yang diambil merupakan keluaran dari diskresi yang kasat mata sehingga dapat di-observasi secara langsung.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Pada kata kemerdekaan dan/atau otoritas-lah semestinya fokus dari makna kata diskresi diarahkan.⁵⁹

Adanya unsur kata 'kemerdekaan' di dalam pengertian diskresi ini menyiratkan bahwa kandungan makna serta cakupan ruang gerak diskresi memang begitu luas adanya. Dengan demikian, diskresi juga mengandung pemahaman bahwa terdapat kemajemukan dan keberagaman di dalam setiap keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil; dari satu individu ke individu lainnya, dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bahkan dari satu waktu ke waktu lainnya. Inilah diskresi sebagai bagian dari demokrasi dalam arti sebenarnya⁶⁰.

Demikianlah, diskresi tidak hanya berkenaan dengan —atau berlangsung dalam— aktifitas tertentu. Semua aktifitas, yang pada dasarnya disusun oleh untaian pengambilan tindakan ini, sesungguhnya dapat dikatakan berpeluang mengandung diskresi. Tentunya sepanjang rangkaian tindakan yang diambil tersebut berangkat dari keputusan yang diyakini sebagai paling tepat; keputusan dan tindakan mana di-pilih secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan serta berpijak pada kemerdekaan dan/atau otoritas. Lain daripada itu, diskresi tidak pula secara eksklusif, khusus dan secara rinci merujuk hanya pada institusi atau organisasi tertentu⁶¹.

Diskresi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan —baik bagi penegak hukum itu sendiri maupun di dalam pelaksanaan tugasnya— walaupun di permukaan tampak bertentangan dengan *rule of law*. Sifat peraturan yang memang terbuka secara logika, membuat elemen diskresi, setidaknya yang implisit, dengan demikian tidak dapat ditolak.

⁵⁹ E. Indarti. 2005b. *Kekuasaan, Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian : Suatu Pemahaman dan Penjabaran Baru Hukum Kepolisian*. (Semarang: Badan Penerbit Undip).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Diskresi pada dasarnya secara alamiah melekat pada dan menyatu dengan individu maupun institusi penegak hukum. Konsekuensinya, diskresi juga melekat secara alamiah pada pelaksanaan setiap tugasnya. Pendeknya, di mana-pun dan kapan-pun, para penegak hukum sebenarnya akan senantiasa berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak ber-landaskan pada diskresi yang ada padanya.

Sebagai catatan, sedikitnya terdapat 4 (empat) 'mis-konsepsi' tentang diskresi. Yang pertama, ada salah persepsi seolah-olah diskresi di lingkungan kepolisian diterapkan hanya terbatas di penegakan hukum lalu-lintas; ada kemungkinan salah persepsi ini muncul karena pembahasan dan contoh kasus diskresi yang adalah selama ini hanya berkisar tentang penanganan polisi pada kasus-kasus pelanggaran lalu-lintas. Yang kedua, ada salah anggapan diskresi hanya berkenaan dengan tindak pidana ringan; hal ini dikarenakan pelanggaran lalu-lintas umumnya dimasukkan dalam kategori tersebut. Yang ketiga, diskresi disalah-artikan sebagai hanya mengenai penghindaran pelanggar hukum dari jeratan hukum, atau dalam bahasa yang lebih sederhana : 'tidak menghukum yang semestinya dihukum'; sekali lagi ini biasa terjadi dalam kasus-kasus penegakan hukum lalu-lintas, utamanya lewat cara-cara penyelesaian 'damai' di tempat kejadian. Yang keempat, dan ini merupakan konsekuensi langsung dari 'mis-konsepsi' nomer 3 tersebut, diskresi disalah-pahami sebagai menyalahi hukum, bahkan mungkin secara ekstrim dituduh secara diam-diam tidak melakukan penegakan hukum atau melawan hukum; ini dikarenakan cara-cara penyelesaian damai seperti disebutkan di atas pada dasarnya 'ilegal', maka dari itu dilakukan sembunyi-sembunyi.

Di bawah ini adalah uraian mengenai bagaimana berbagai aliran filsafat hukum, berikut paradigma yang menaunginya, berbeda satu-sama-lain dalam memaknai dan menerapkan diskresi.

1. Paradigma, Aliran Filsafat Hukum, dan Penggunaan Diskresi

Hadirin yang saya muliakan

Paradigma positivisme —utamanya aliran hukum positivis— mewajibkan penganutnya untuk senantiasa berupaya 'membaca' hukum secara kaku atau tekstual⁶². Menurut aliran ini, para praktisi hukum bahkan dituntut untuk tidak 'menafsir' hukum lebih daripada apa yang terbaca secara tekstual. Dengan kata lain, penerapan paradigma positivisme di dalam ranah ilmu hukum membawa konsekuensi tidak dimungkinkannya penerapan diskresi, baik dalam menjelaskan kasus hukum yang tengah dihadapi maupun dalam membaca sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, kalau ternyata masih banyak penegak hukum yang 'membaca' hukum secara kaku dan tekstual; maka ini berarti banyak penegak hukum menganut paradigma positivisme, utamanya aliran hukum positivis. Adalah aliran filsafat hukum lain di dalam naungan paradigma pos-positivisme, semisal aliran hukum realis, aliran hukum sosiologis, serta aliran hukum dan masyarakat, yang membuka peluang bagi para praktisi hukum untuk menerapkan kemerdekaan sekaligus melibatkan subjektivitas mereka di dalam 'menafsir' hukum yang dibaca.

Aliran filsafat hukum yang lain lagi, yaitu yang termasuk ke dalam paradigma 'critical theory', seperti aliran 'critical legal theory', 'feminist jurisprudence', dan 'critical race theory', bahkan meminta penganutnya untuk tidak mempercayai hukum begitu saja dan mewajibkan mereka untuk terus menafsir hukum secara kritis karena didasarkan pada realitas atau struktur yang bersifat historis/virtual sehingga cenderung tidak adil, opresif, timpang, dan eksploitatif⁶³. Dengan kata lain, aliran-aliran ini mendorong penganutnya untuk tidak ragu menerapkan diskresi mereka.

⁶² E. Indarti. 2001. 'Legal constructivism: paradigma baru pendidikan hukum dalam rangka membangun masyarakat madani'. Masalah-Masalah Hukum (XXX: 3).

⁶³ E. Indarti. 2002. 'Selayang pandang *Critical Theory*, *Critical Legal Theory*, dan *Critical Legal Studies*'. Masalah-Masalah Hukum (XXXI: 3).

Lebih jauh lagi, aliran filsafat hukum yang tergabung ke dalam perspektif interpretivisme, contohnya aliran hukum interpretivis, aliran hukum fenomenologis, dan aliran hukum simbolik-interaksionis, malah tidak mengenal 'bacaan hukum'; semua yang ada bagi aliran-aliran ini hanyalah 'tafsir/interpretasi atau rangkaian proses menafsir/meng-interpretasi hukum' guna mencapai makna sejatinya. Artinya, tidak ada yang bukan diskresi; bagi mereka, pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum, semua sebenarnya adalah penerapan diskresi.

Terakhir, bagi aliran hukum konstruktivis yang menjadi bagian dari paradigma konstruktivisme, lebih daripada sekedar 'menafsir' apalagi 'membaca', setiap individu sesungguhnya merdeka dan aktif 'meng-konstruksi' hukum berdasarkan realitas eksperiensial (realitas berbasiskan pengalaman) yang ada padanya, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum diartikan oleh aliran ini sebagai bagian dari proses meng-konstruksi hukum. Jadi, hukum di titik ini adalah konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, dan beragam⁶⁴.

Ketika individu ber-interaksi dengan 'the others' (individu lain, kelompok individu, atau institusi), maka secara demokratis akan terjadi konsensus, harmoni, atau resultante di antara sekalian konstruksi. Dengan demikian, menurut aliran hukum konstruktivis, hukum pada intinya adalah konsensus atau kesepakatan relatif dan kontekstual. Karenanya, tidak lagi relevan untuk berbicara tentang atau memperdebatkan antara 'bacaan' dengan 'tafsiran' atau 'bukan diskresi' dengan 'diskresi'.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dominasi paradigma positivisme masih mengemuka di dunia hukum Indonesia. Kendati demikian, di satu sisi, dominasi ini tampaknya mulai digerus oleh berkembangnya paradigma pos-positivisme di lingkungan akademisi dan praktisi hukum. Di sisi lain, tidak sedikit mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang mengadopsi paradigma '*critical theory*'. Di sisi yang lain lagi, ada pula segelintir

⁶⁴ E. Indarti. 2001.

orang yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk merenung lebih jauh hingga kemudian bersedia merengkuh perspektif interpretivisme. Yang menarik, sungguhpun mereka menganut beragam paradigma atau perspektif, di balik itu semua sangat boleh jadi tanpa disadari sejatinya mereka adalah konstruktivis. Coba saja simak begitu banyak komentar para pakar politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di berbagai media massa tentang perlunya dicari terobosan dalam rangka membangun 'konsensus', dari tingkat lokal hingga nasional, untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat, bangsa, dan negara yang tak kunjung usai. Hasrat untuk mencapai konsensus inilah yang biasanya dianggap sebagai pertanda munculnya pergeseran menuju konstruktivisme.

Sampai di titik ini kiranya perlu digaris-bawahi bahwa penafsiran terhadap hukum bukanlah persoalan ideal atau tidak ideal, melainkan masalah pilihan. Siapa saja boleh memilih paradigma atau perspektif sesuai kehendaknya. Dengan catatan, pilihan ini dilakukan secara merdeka. Ini berarti, semestinya tidak ada paksaan dalam paradigma: paradigmu adalah paradigmu, dan paradigmu adalah paradigmu.

Yang penting, pemahaman yang penuh dan jujur, komitmen, serta *devotion* terhadap paradigma atau perspektif yang dianut, tetap terjaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah, kemerdekaan untuk memilih paradigma di atas harus diikuti oleh demokrasi di dalam 'perjumpaan' dan 'pergaulan' di antara sekalian paradigma atau perspektif yang ada. Dengan sendirinya akan tercipta semacam 'harmoni' di antara mereka. Untuk itu, biarlah masing-masing paradigma atau perspektif tersebut membuka dan memperkenalkan diri; dan biarlah masing-masing anak bangsa ini memilih paradigma atau perspektif, berikut aliran filsafat hukum yang tergabung di dalamnya, yang diyakini "pas" untuknya.

Di bawah ini dapat dilihat hubungan antara paradigma, aliran Filsafat Hukum, dan penggunaan diskresi.

**Tabel 5. Paradigma, Aliran Filsafat Hukum,
dan Penggunaan Diskresi**

Paradigma	Aliran Filsafat Hukum	Bacaan Hukum	Diskresi
Positivisme	Aliran hukum positifis	Kaku, tekstual, tanpa penafsiran	Tidak dimungkinkan
Pos-positivisme	Aliran hukum realis, aliran hukum sosiologis, serta aliran hukum dan masyarakat	Kemerdekaan dan subjektivitas di dalam penafsiran	Dimungkinkan
<i>Critical theory</i>	Critical legal theory, feminist jurisprudence, dan critical race theory	Hukum didasarkan pada realitas/ struktur virtual, sehingga : <ul style="list-style-type: none"> • cenderung tidak adil, opresif, timpang, eksploitatif; • tidak dapat dipercayal begitu saja, dan • wajib untuk terus ditafsir secara kritis 	Tidak ada keraguan dalam penggunaan diskresi
Interpretivisme	Aliran hukum interpretivis, aliran hukum fenomenologis, dan aliran hukum simbolik-interaksionis	Tidak mengenal bacaan hukum; semua yang ada hanyalah rangkaian proses penafsiran/ interpretasi guna mencapai makna sejatinya	Penerapan diskresi di seluruh proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum
Konstruktivisme	Aliran hukum konstruktivis	Hukum adalah konstruksi mental berupa konsensus atau kesepakatan yang bersifat relatif, majemuk, beragam, dan kontekstual	Kemerdekaan untuk secara kontekstual meng-konstruksi hukum berdasarkan realitas eksperiensial (realitas berbasiskan pengalaman)

2. Diskresi dan Konsistensi Hukum

Masing-masing paradigma, termasuk aliran filsafat hukum di dalamnya, juga melihat konsistensi hukum —dalam hubungannya dengan diskresi atau kemerdekaan untuk menafsir hukum— secara berbeda-beda. Di dalam paradigma positivisme, konsistensi hukum terletak pada ditutupnya kemungkinan untuk terjadinya diskresi. Artinya, bagi para positivis, hukum akan konsisten jika dan hanya jika ia tidak ditafsir. Adapun konsistensi hukum di dalam konteks paradigma pos-positivisme terletak pada adanya batas-batas bagi kemerdekaan dalam menafsir hukum. Maksudnya adalah, paradigma pos-positivisme meyakini bahwa adanya diskresi sama sekali tidak mengurangi konsistensi hukum; sepanjang ada batas yang nyata bagi diskresi tersebut.

Dalam konteks paradigma 'critical theory', hukum dipandang konsisten jika penafsiran hukum terus diupayakan dalam rangka, pertama, meng-eksplorasi ketidak-adilan, opresi, ketimpangan, dan eksploitasi; kedua, merubah kemasa-bodohan menjadi gerakan nyata; dan ketiga, memperjuangkan emansipasi dan restitusi. Perspektif interpretivisme meletakkan konsistensi hukum pada berlangsung-nya proses penafsiran dan tercapainya makna sejati hukum di dalam interaksi manusia. Sedangkan konsistensi hukum di dalam paradigma konstruktivisme justru terletak pada relativitas-nya —di mana setiap individu, kelompok individu, atau institusi merdeka untuk secara aktif 'meng-konstruksi' hukum— serta pada demokrasi-nya, melalui mana konsensus atau kesepakatan terbangun.

Hubungan antara diskresi dan konsistensi hukum dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 6. Diskresi dan Konsistensi Hukum

Paradigma	Aliran Filsafat Hukum	Konsistensi Hukum
Positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum positivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dan hanya jika dapat terus dipastikan agar hukum tidak ditafsir atau diskresi tidak digunakan/diterapkan
Pos-positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum realis, • Aliran hukum sosiologis, • Aliran hukum dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang ada koridor atau batas yang nyata bagi penafsiran hukum atau bagi penggunaan/ penerapan diskresi
<i>Critical theory</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Critical legal theory,</i> • <i>Feminist jurisprudence,</i> • <i>Critical race theory.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika penafsiran hukum atau penggunaan/ penerapan diskresi dilaksanakan dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> o pertama, meng-eksplorasi/membongkar ketidak-adilan, opresi, ketimpangan, dan eksploitasi; o kedua, men-transform/merubah kemasa-bodohan menjadi gerakan nyata; o ketiga, memperjuangkan emansipasi dan restitusi
Perspektif Interpretivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum interpretivis, • Aliran hukum fenomenologis, • Aliran hukum simbolik - interaksionis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tat kala penafsiran hukum dapat terus berlangsung menuju makna sejati-nya, atau pewujudan diskresi sebagai pengejawantahan hukum dapat terus terlaksana
Konstruktivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum konstruktivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Manakala hukum tidak lagi dikaitkan dengan diskresi atau bukan diskresi • Manakala relativitas/fleksibilitas hukum dapat di pertahankan; di mana setiap individu, kelompok, dan/atau institusi merdeka untuk terus secara aktif 'men-konstruksi' hukum • Manakala demokratisasi hukum dapat dijaga; melalui mana konsensus atau kesepakatan terus terbangun di antara sekalian individu, kelompok, dan/atau institusi

3. Diskresi dan Keadilan

Hadirin yang saya hormati

Dalam hal keadilan, pandangan sekalian paradigma tersebut juga berbeda satu sama lain sejalan dengan perbedaan yang ada berkenaan dengan konsistensi hukum seperti telah dipaparkan di atas. Para pakar, praktisi, atau pengamat hukum yang menganut paradigma positivisme, misalnya, justru berpendapat bahwa keadilan bagi masyarakat dapat terjamin jika dan hanya jika hukum 'dibaca' apa adanya secara tekstual. Sedangkan bagi penganut paradigma pos-positivisme, hukum tidak selalu harus 'dibaca' secara kaku seperti ini, bila diperlukan hukum dapat 'ditafsir' agar keadilan bagi masyarakat dapat terjamin.

Untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, para penganut paradigma 'critical theory' bahkan diwajibkan untuk tidak mempercayai hukum begitu saja dan terus 'menafsir' hukum secara kritis. Mereka yang menganut perspektif interpretivisme malah melulu 'menafsir' untuk menuju makna sejati hukum demi terjaminnya keadilan bagi masyarakat. Adapun para penganut paradigma konstruktivisme tidak lagi bicara tentang 'baca-membaca' atau 'tafsir-menafsir'; menurut mereka, keadilan bagi masyarakat dapat terjamin tatkala kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk secara aktif 'meng-konstruksi' hukum —untuk kemudian mewujudkan resultante konstruksi hukum atau mencapai konsensus / kesepakatan melalui proses demokrasi— bisa dijamin pula.

Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara diskresi dan keadilan.

Tabel 7. Diskresi dan Keadilan

Paradigma	Aliran Filsafat Hukum	Keadilan
Positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum positifis 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dan hanya jika hukum 'dibaca' apa adanya secara tekstual (tidak ditafsir) atau penggunaan/penerapan diskresi tidak terjadi
Pos-positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum realis, • Aliran hukum sosiologis, • Aliran hukum dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang hukum tidak 'dibaca' secara kaku atau dapat ditafsir, dengan kata lain sepanjang penggunaan/penerapan diskresi masih dimungkinkan
<i>Critical theory</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Critical legal theory,</i> • <i>Feminist jurisprudence,</i> • <i>Critical race theory.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika hukum tidak dipercayai begitu saja sehingga harus ditafsir secara kritis, atau ketika diskresi harus diupayakan, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat
Perspektif Interpretivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum interpretivis, • Aliran hukum fenomenologis, • Aliran hukum simbolik-interaksionis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tatkala hukum 'melulu' ditafsir untuk menuju makna sejati-nya, atau tatkala diskresi adalah ? atau menjadi wujud pengejawantahan? hukum, demi terjaminnya keadilan bagi masyarakat
Konstruktivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum konstruktivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Manakala perdebatan mengenai diskresi atau bukan diskresi tidak lagi relevan • Manakala kemerdekaan setiap individu, kelompok, dan/atau institusi untuk secara aktif meng-konstruksi hukum ? untuk kemudian mewujudkan resultante konstruksi hukum atau mencapai konsensus/kesepakatan melalui proses demokrasi? bisa dijamin

4. Batas Diskresi

Dalam pada itu, batas bagi penerapan diskresi atau kemerdekaan untuk menafsir hukum, sekali lagi, bergantung pada paradigma dan/atau aliran filsafat hukum yang dianut oleh yang bersangkutan. Paradigma positivisme tidak memperbolehkan hukum ditafsirkan sama-sekali. Dapat dikatakan paradigma ini menerapkan semacam 'zero interpretation policy'. Paradigma pos-positivisme membuka peluang bagi penafsiran terhadap hukum yang ada bilamana diperlukan; itupun dibatasi di dalam koridor berupa, antara lain, otoritas, kebijaksanaan, pertimbangan, dan kemampuan untuk memilih secara tepat dari para penafsir itu sendiri.

Di dalam paradigma 'critical theory', diskresi atau kemerdekaan dalam penafsiran hukum bisa dikatakan tidak mempunyai batas dan akan terus dilakukan secara kritis dengan cara memberikan advokasi kepada masyarakat hingga, pertama, 'kebobrokan' hukum dapat terbongkar melalui ekskavasi terhadap ketidak-adilan, opresi, ketimpangan, dan eksploitasi; kedua, kemasa-bodohan masyarakat dapat 'di-transform' menjadi gerakan nyata; dan ketiga, emansipasi dan restitusi dapat terwujud. Adapun perspektif interpretivisme

memberikan kebebasan manusia untuk terus menafsir hukum secara berkelanjutan ketika mereka saling berinteraksi, sepanjang ini dimaksudkan guna mencapai maknanya yang sejati.

Paradigma konstruktivisme, sementara itu, mengedepankan 'kemerdekaan', bukan 'kebebasan', bagi setiap individu, kelompok individu, atau institusi untuk secara aktif 'meng-konstruksi' hukum dan kemudian secara demokratis membangun konsensus atau kesepakatan. Batas penerapan diskresi atau kemerdekaan untuk menafsir hukum dengan demikian menjadi tidak lagi relevan di dalam paradigma konstruktivisme. Dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, terus saja berlangsung proses konstruksi-rekonstruksi hukum secara berkelanjutan, disusul oleh terbangun dan tergantikannya kesepakatan atau konsensus relatif, satu-demi-satu. Di bawah ini adalah tabel tentang batas diskresi.

Tabel 8. Batas Diskresi

Paradigma	Allran Flisafat Hukum	Batas Diskresi
Positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum positivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penafsiran hukum atau penggunaan/penerapan diskresi tidak dimungkinkan sama-sekali: <i>'zero interpretation/discretion policy'</i>.
Pos-positivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum realis, • Aliran hukum sosiologis, • Aliran hukum dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka pekaang bagi penafsiran hukum atau penggunaan/penerapan diskresi, sepanjang diperlukan, yang dibatasi koridor berupa a.l.: <ul style="list-style-type: none"> o kekuasaan, o otoritas, o kebijaksanaan, o pertimbangan, dan o kemampuan, untuk memilih keputusan/lindakan hukum secara tepat yang didasarkan pada intelektualitas dan ke-cendekiawan-an dari para penafsir atau pengguna/penerap diskresi itu sendiri
Critical theory	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Critical legal theory,</i> • <i>Feminist jurisprudence,</i> • <i>Critical race theory.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika penafsiran hukum atau penggunaan/ penerapan diskresi bermuara pada: <ul style="list-style-type: none"> o pertama, di-eks kavasi-nya ketidak-adilan, opresi, ketimpangan, dan eksploitasi; o kedua, di-transform-nya kemasa-bodohan menjadi gerakan nyata; o ketiga, dicapainya emansipasi dan restitusi
Perspektif Interpretivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum interpretivis, • Aliran hukum fenomenologis, • Aliran hukum simbolik - interaksionis 	<ul style="list-style-type: none"> • Talkala makna sejati hukum tercapai melalui penafsiran hukum, atau diskresi terwujud sebagai pengejawantahan hukum
Konstruktivisme	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum konstruktivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Batas penafsiran hukum atau penggunaan/ penerapan diskresi tidak relevan • Batas penafsiran hukum atau penggunaan/ penerapan diskresi bisa dikalakan relativitas/ fleksibilitas hukum itu sendiri; di mana proses konstruksi-rekonstruksi hukum oleh individu, kelompok, dan/atau institusi berlangsung secara berkelanjutan • Demokratisasi hukum bisa juga dipandang sebagai batas penafsiran hukum atau penggunaan/penerapan diskresi; di mana konsensus atau kesepakatan relatif terus- menerus terbangun dan tergantikan

4. Diskresi dan Diskriminasi

Demikianlah, di atas telah dipaparkan bagaimana gradasi perbedaan paradigmatis membentang di antara sekalian pakar, praktisi, dan pengamat hukum dalam memahami sekaligus menerapkan diskresi atau, singkatnya, kemerdekaan untuk menafsir hukum. Di bagian akhir pembahasan ini, saya mengajak hadirin untuk berkontemplasi barang sejenak mengenai adanya sinyal bahwa hukum ternyata seringkali diterapkan secara berbeda —diskriminatif, katakanlah begitu— dari satu orang ke orang yang lain. Artinya, sesuai konteks pidato pengukuhan ini, saya ingin meminta perhatian hadirin berkenaan dengan relasi antara diskresi dan diskriminasi.

Rasanya sulit untuk meninjau persoalan dimaksud dari sudut pandang paradigma positivisme. Bagaimana tidak, paradigma positivisme pada dasarnya menolak adanya diskresi, sehingga dengan demikian tidak mengakui adanya perbedaan penerapan hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan tafsiran hukum. Para penganut paradigma ini berkeyakinan hukum seharusnya diterapkan sama-rata kepada siapa saja bagaimanapun keadaannya; walaupun kenyataannya di lapangan justru bertolak-belakang. Artinya penerapan hukum tidak jarang dirasakan berbeda oleh yang tidak berkuasa, yang tidak mempunyai, yang lemah, dan yang terpinggirkan.

Paradigma pos-positivisme, sementara itu, bisa menjelaskan persoalan di atas secara lebih baik. Dalam konteks paradigma pos-positivisme, persoalan ini adalah contoh klasik diskresi yang diterapkan secara diskriminatif. Karenanya, penting bagi para penegak hukum untuk memahami kekuasaan, otoritas, dan diskresi yang ada padanya secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari kecenderungan diskriminatif dari diskresi yang diterapkannya.

Paradigma 'critical-theory' mempunyai penjelasan yang lain, diskresi yang bersifat diskriminatif ini terjadi karena sifat buruk dari hukum yang disusun oleh penguasa itu sendiri yang memang tidak adil, opresif, timpang, dan eksploitatif. Untuk itu, sifat buruk dari hukum tersebut harus 'dibongkar', masyarakat yang masa-bodoh

harus digerakkan, serta emansipasi dan restitusi harus diperjuangkan.

Menurut perspektif interpretivisme, diskresi akan cenderung diskriminatif jika proses penafsiran atau interpretasi hukum tidak dapat berlangsung dengan sehat dan jika makna sejati dari hukum belum dipahami. Untuk mencegah hal ini, baik penguasa maupun rakyat jelata dituntut untuk memberikan kontribusinya guna memastikan berlangsungnya proses interpretasi hukum dengan sehat dan dipahaminya makna sejati hukum bagi semua pihak dengan baik dan benar. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi 'kebohongan' penafsiran/interpretasi yang bermuara pada diskresi diskriminatif yang menyengsarakan rakyat.

Akhirnya, untuk mengurai persoalan ini, paradigma konstruktivisme berangkat dari pemahaman bahwa manusia pada galibnya secara merdeka dan aktif meng-konstruksi hukum berdasarkan realitas eksperiensial (realitas bebasiskan pengalaman) yang ada padanya, serta secara demokratis membangun resultante, kesepakatan, atau konsensus di antara sekalian konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu-nya. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan di atas, perlu diupayakan agar hukum di konstruksi berdasarkan realitas eksperiensial yang disusun oleh informasi yang 'valid'. Kemerdekaan dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi hukum untuk itu harus betul-betul dijamin. Hanya dengan ini demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam proses pembangunan resultante, kesepakatan, atau konsensus di antara berbagai konstruksi hukum yang ada. Dalam hal ini, resultante, kesepakatan, atau konsensus tersebut bersifat relatif dan kontekstual.

Paradigma konstruktivisme meyakini, hanya dengan pemahaman inilah dapat berlangsung proses konstruksi-rekonstruksi hukum sekaligus pencapaian konsensus pemahaman hukum di antara semua pihak yang bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi persoalan 'kaku'nya hukum ketika diterapkan bagi mereka yang tidak punya kuasa, dan 'lentur'nya hukum tatkala diterapkan bagi mereka yang berkuasa.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hadirin yang saya muliakan

Membaca keseluruhan uraian di atas, kiranya dapat diambil butir-butir simpulan sebagai berikut.

- Filsafat Hukum pada dasarnya berintikan terutama pembahasan tentang berbagai aliran Filsafat Hukum.
- Melalui kajian paradigmatis, aliran Filsafat Hukum yang ada —yang pada dasarnya adalah *belief* dasar atau *worldview* itu— dapat dirunut lalu dipilah ke dalam ontologi, epistemologi, serta metodologi.
- Dengan perbandingan yang lebih luas melalui kajian paradigmatis ini, dapat dilihat sebenarnya seberapa jauh ataupun seberapa dekat perbedaan di antara beragam aliran Filsafat Hukum tersebut.
- Penerapan dan penegakan hukum di alam nyata sejatinya adalah pengejawantahan dari penggunaan diskresi.
- Kajian paradigmatis memberikan manfaat berupa pengertian yang baik dan benar mengenai nuansa atau gradasi perbedaan yang ada dalam memahami dan menggunakan diskresi.
- Kajian paradigmatis memungkinkan Filsafat Hukum untuk menelusuri perbedaan yang ada di antara beragam aliran Filsafat Hukum berkenaan dengan —untuk kemudian membangun pemahaman tentang— diskresi berikut penggunaannya secara lebih rinci, halus, dan tajam.
- Prasangka dan jurang pemisah yang selama ini membentang di antara sekalian aliran Filsafat Hukum menyangkut diskresi dan penggunaannya mulai dapat terkikis dan terjembatani oleh kajian paradigmatis.

2. Saran

Mengikuti apa yang telah diuraikan dalam pidato pengukuhan ini, selanjutnya dapat dipertimbangkan upaya berkelanjutan berikut ini.

- Menggagas landasan berpikir baru dalam bidang Filsafat Hukum.
- Mengembangkan kajian paradigmatik tentang komparasi berbagai aliran Filsafat Hukum.
- Membangun pemahaman tentang diskresi dan penggunaannya secara baik dan benar.
- Membuka hati untuk menerima keberagaman pemahaman hukum melalui komparasi paradigmatik berbagai aliran Filsafat Hukum, sehingga jurang pemisah yang ada dapat terhubung dan kompleksitas persoalan hukum-pun dapat terurai sekaligus terselesaikan.

F. PESAN BAGI DOSEN MUDA, MAHASISWA, DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya hormati

Dalam beberapa tahun terakhir ini, setidaknya seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia, dunia akademik diramaikan oleh hadirnya kata 'paradigma', di setiap waktu, di setiap kesempatan. Sehubungan dengan hal ini, saya ingin mengajak adik-adik dosen muda —pencerdas kehidupan bangsa— untuk merenungkan dan meletakkan kembali pemahaman tentang paradigma pada tempatnya yang sesuai, seraya terus berupaya mengembangkan pemahaman paradigma yang lebih komprehensif.

Lain daripada itu, saya ingin mengingatkan para dosen muda bahwa, perubahan kehidupan yang diikuti oleh perkembangan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan mensyaratkan adanya kegiatan penggagas landasan berpikir baru, termasuk dalam lingkup Filsafat Hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan permasalahan hukum dapat terumuskan secara lebih baik, pertanyaan dapat tersusun secara lebih cermat, dan jawaban atas pertanyaan

dimaksud dapat tersampaikan secara lebih tepat. Tanpa adanya hal ini maka Ilmu Pengetahuan pada umumnya, termasuk Filsafat Hukum pada khususnya, seolah akan 'jalan ditempat'. Untuk itu, upayakan terus kegiatan penggagasan landasan berpikir baru, utamanya dalam lingkup Filsafat Hukum

Kepada para mahasiswa yang saya cintai, saya berharap dapat menyadari bahwa pertama-tama kalian sejatinya adalah seorang 'cendekia'. Dalam maknanya yang luas, 'cendekia' dapat dipahami sebagai akademis, berpendidikan, terpelajar, pakar, intelek, berketerampilan, terlatih, berpengetahuan, berpengalaman, berkecukupan dalam informasi, berkecukupan dalam bacaan, melék huruf dalam baca dan tulis, serta berbudaya. Dalam kaitan ini, sebagai seorang 'cendekia', diharapkan kalian dapat meresapi makna paradigma sebagai layaknya 'jati diri', yang mencakup jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan dasar filosofis yang kemudian terwujud di dalam olah pikir, sikap, kata dan perbuatan kalian semua. Singkatnya, jadikan paradigma sebagai jati diri kecendekiawan-an kalian.

Selanjutnya, saya juga ingin berpesan kepada para mahasiswa agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya berkelanjutan untuk memperluas cakrawala, momodifikasi, serta menggagas sudut pandang baru terhadap rangkaian pengetahuan dalam lingkup Filsafat Hukum. Jangan ragu untuk menggapai dan merengkuh Filsafat Hukum, karena dapat membantu kalian untuk berselancar dalam era perubahan yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan—seperti yang tengah berlangsung di Indonesia belakangan ini—dengan aman dan sentosa.

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenalkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, atas kepercayaan, kehormatan, bantuan, dan dukungan, dalam segala bentuknya, yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, kepada :

- Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia.

- Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, Prof Dr dr Susilo Wibowo, MS Sp And.
- Sekretaris Senat Universitas Diponegoro, Prof Dr Ir Sunarso, MS, beserta Anggota Senat Universitas Diponegoro.
- Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro.
- Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro, Prof Dr dr Ign Riwanto, Sp Bd; Prof. Muhamad Nasir, Akt, PhD; Sukinta, SH Mhum; dan Dr Muhammad Nur, DEA.
- Para Anggota Peer Group, Prof. Dr. Yusriadi, SH., MH.; Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS.; Prof. Dr. FX Adji Samekto, SH., MH.; Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanto Raballa, SH., MH.; Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., CN., M.Hum; Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D.; Prof. Drs. Soedjarwo.
- Almarhum Prof Sudarto, SH; Prof Dr Satjipto Rahardjo, SH; Prof IGN Sugngga, SH; Prof Dr Sukemi, SH CN; Prof Soehardjo SS, SH; Prof Dr Imam Sayekti Soesanto, SH; Prof Ronny Hanitijo Soemitro, SH; Han Bing Ho, SH; Prof H Purwahid Patrik, SH; Samiadji Soerjotjaroko, SH.
- Para Guru Besar di Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Prof Dr H Barda Nawawi Arief, SH; Prof Dr Muladi, SH; Prof Dr Sri Redjeki, SH; Prof Dr Moempoeni Maemoenah Moelatningsih Martojo, SH; Prof Dr Hj Esmi Warassih, SH MS; Prof Dr Njoman Sarikat Putrajaya, SH MH; Prof Abdullah Kelib, SH; Prof Dr Paulus Hadi Suprpto, SH MH; Prof Dr Drs Gunawan Setiardo; Prof Dr Etty Susilowati, SH MH; Prof Dr Suteki, SH MH; dan Prof Dr Benny Riyanto, SH MH.
- Para Direktur dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Prof Dr Arief Hidayat, SH MH.
- Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Prof Dr Yos Johan Utama, SH MH; Untung Dwi Hananto, SH MH; Dadang Siswanto, SH MH; dan Lapon Tukan Leonard, SH MA. “

- Pembimbing S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Prof Sudarto, SH; Pembimbing S2, Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, Dr. Saskia Wieringa, MA; Dr. Inez Smith, MA Pembimbing S3, Flinders University, Adelaide, South Australia, Dr Alaric Maude.
- Para Dosen Senior, Dosen, dan Dosen Muda di Lingkungan Fakultas Hukum, pada khususnya, dan di Lingkungan Universitas Diponegoro, pada umumnya.
- Seluruh Staf Administrasi di Lingkungan Fakultas Hukum, pada khususnya, dan di Lingkungan Universitas Diponegoro, pada umumnya.
- Pak Djanto, Pak Radji, Pak Nardi, Pak Hodo, dan Bapak-Ibu Staf Administrasi di Lingkungan Universitas Diponegoro lainnya yang mem-fasilitasi persiapan administrasi Usulan Kenaikan Pangkat ke Guru Besar.
- Mahasiswa/i S1, S2, dan S3 di Lingkungan Fakultas Hukum, pada khususnya, dan di lingkungan Universitas Diponegoro, pada umumnya, maupun di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, yang saya sayangi.
- Ayahanda, Almarhum H.M.A. Ibrahim, dan Ibunda, Hj Siti Djuharjah.
- Suamiku tercinta, Belahan Jiwaku, sekaligus Guru Kehidupanku.
- Anak-anakku terkasih, Buah Hatiku, sekaligus Semangat Kehidupanku.
- Panitia Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Senat, Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Para Sejawat, Kerabat dan Handai Taulan, serta seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT Tuhan YME memberkati.

Demikian Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R.L. (Ed.). 1995. *The Law and Society Reader*. New York : New York University Press.
- Bankowski, Z. dan Mungham, G. 1976. *Images of Law*. London : Routledge & Kegan Paul.
- Cavers, D.F. 1972. 'Legal education' di dalam Berman, H.J. *Talks on American Law*. Harvard : Voice of America.
- Chalmers, A.F. 1982. *What is Thing Called Science?*. St. Lucia: University of Queensland Press.
- Chand, H. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : International Law Book Services.
- Collins Dictionary and Thesaurus*. 1991.
- Collins Dictionary of Anthropology*. 1991. Glasgow : HarperCollinsPublishers.
- Darmodiharjo, D. dan Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. 1994. *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications, Inc.
- Derham, D., Maher, F. dan Waller, L. 1986. *An Introduction to Law*. North Ryde : The Law Book Company.
- Echols, J.M. dan Shadily, H. 2000. *Kamus Inggris – Indonesia*. (Jakarta: Gramedia).
- Frug, G.E. 1988. 'A critical theory of law'. Paper dipresentasikan pada *Law Schools Association Conference*, Sydney University.
- Gie, T.L. 1977. *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Karya Kencana.

Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. 1004. *Competing paradigms in qualitative research*, di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications Inc.

Hoyningen-Huene. 1993. Di dalam, K. Cunningham, *Web Dictionary of Cybernetics and Systems*.

Huijbers, T. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Indarti, E. 2000. *Diskresi Kepolisian*. (Semarang: Badan Penerbit Undip).

_____. 2001. 'Legal constructivism: paradigma baru pendidikan hukum dalam rangka membangun masyarakat madani'. *Masalah-Masalah Hukum* (XXX: 3).

_____. 2002. 'Selayang pandang *Critical Theory*, *Critical Legal Theory*, dan *Critical Legal Studies*'. *Masalah-Masalah Hukum* (XXXI: 3).

_____. 2005a. 'Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum'. Makalah disampaikan pada Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP.

_____. 2005b. *Kekuasaan, Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian : Suatu Pemahaman dan Penjabaran Baru Hukum Kepolisian*. (Semarang: Badan Penerbit Undip).

_____. 2007. 'Komparasi Berbagai Aliran Filsafat Hukum : Suatu Kajian Filsafat Hukum'. Laporan Penelitian. *Majalah Ilmiah FH Unissula, Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 3, September 2007.

Johnston, R.J. et.al. (eds.). 1986. *The Dictionary of Human Geography, Second Edition*. (Oxford: Basil Blackwell Ltd.).

Kuhn, T. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago : Chicago University Press (2nd ed. 1970).

Mahadi. 1991. *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 1991.

McCoubrey, H. dan White, N.D. 1993. *Textbook on Jurisprudence*. London : Blackstone Press Limited.

- Neuman, W. L. 1991. *Social Research Methods*. London : Allyn and Bacon.
- Oxford: the Australian Reference Dictionary. 1992.
- Patton, M.Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. (Newbury Park, CA: Sage).
- Rasjidi, L. 1984. *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Reid, L.A. 1962. *Phiolosophy and Education*. London : Heinemann.
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Melbourne : Macmillan Education Australia Pty. Ltd.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sugarman, D. 1986. 'Legal theory, the common law mind and the making of the textbook tradition' di dalam Twining, W. (ed.) *Legal Theory and Common Law*. Oxford : Basil Blackwell.
- Suriasumantri, J.S. 1985. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Thornton, M. 1986. 'Feminist jurisprudence : illusion or reality ?' *Australian Journal of Law and Society*. 3.
- Wacks, R. 1995. *Jurisprudence*. London : Blackstone Press Limited.
- Webb, C.C.J. 1952. *Geschiedenis der Wijsbegeerte*, Assen, di dalam Mahadi. *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 1991.
- Wignjosoebroto, S. 2000. Bahan Kuliah Penulisan Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

- Nama : Prof. Erlyn Indarti, SH, MA, PhD.
- NIP : 19530902 198603 2 001
- Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 2 September 1953
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Golongan / Pangkat : IV a / Pembina
- Jabatan : Guru Besar
- Unit Kerja : Fakultas Hukum UNDIP
- Alamat Kantor : Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1
- Telp./Faks. : 024 8316870
- Alamat Rumah : Jl. Basudewo 1086, Semarang
- Telp./Faks. : 024 7607829
- Alamat e-mail : erlyn@ymail.com
erlyn@kopolnas.go.id
- Nama Suami : Ir. SS Rushdie, MA, PhD.
- Nama Anak : Ulung Wicaksono
Luhung Winaskito
Rizqi Adri Muhammad
Delia Anindyarasmi
- Nama Ayah Kandung : H.M.A. Ibrahim (alm)
- Nama Ibu Kandung : Hj. Siti Djuharjah

2. Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri Simongan II, Semarang (1965)
- SMP Negeri I Semarang (1968)
- SMA Negeri I-II Semarang (1971)
- Sarjana Muda II Ilmu Hukum (1979)
- S1 : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (1981);
- S2 : Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands (1991);
- S3 : Legal and Development Studies, Flinders University, Adelaide, South Australia (1998), dengan Desertasi :

Toward Democratic Policing : Problems of Law, Order, and Community in Semarang, Central Java

3. Pendidikan Tambahan, Kursus dan Pelatihan :

Dalam Negeri :

- AKTA IV, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP), Semarang, 1986
- PEKERTI, Universitas Diponegoro, 1987
- Applied Approach, Universitas Diponegoro, 1988
- Penataran P-4 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 1989
- Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP, 1992
- Metodologi Penelitian Kualitatif, UGM, 1993

Luar Negeri :

- Vrouwen en Autonomy, Rijk University, Leiden, The Netherlands, 1987
- Women and Economy, London School Of Economics, 1990
- Law and Police, Netherlands Police Academy, 1998
- Women, Law and Development, Flinders University, 1993
- Community Based Oriented Policing, South Australia Police Academy, 1995
- Regional Development and Planning, Shanghai University, Cina, 2005
- Police Organization Management, National Police Agency, Tokyo, Jepang, 2009;
- Independent Police Complain Commission, London, Inggris, 2009;
- Control of Police, Netherlands Police Institute, Den Haag, Belanda, 2009.

4. Bidang Keahlian:

- Filsafat Hukum
- Teori hukum
- Hukum dan Wanita/study wanita
- Ilmu Kepolisian

5. Riwayat Pekerjaan :

- Pengajar pada bag dasar-dasar ilmu hukum Fakultas Hukum Undip, 1986- sekarang
- Pengajar pada Akademi Kepolisian (AKPOL), Semarang : 1986 – 2009.
- Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, UNNES : 2001 – 2005.
- Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana UNDIP : 2000 – 2002.
- Pengajar pada Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Pantai, Program Pasca Sarjana, UNDIP : 2000 – 2005.
- Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, UNDIP : 1999 – 2005.
- Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, UNISSULA : 2000 – Sekarang.
- Pengajar pada Program Studi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo : 1999 – 2002.
- Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana UNDIP : 1998 – 2005.
- Dosen Tamu pada Sekolah Staf Perwira Tinggi (Sespati) POLRI

6. Riwayat Kepangkatan :

- Calon Pegawai Negeri Sipil, Tahun 1986
- Penata Muda, III-A, Tahun 1986
- Penata Muda Tingkat I, III B, Tahun 1991
- Penata, III C, Tahun 1993
- Penata Tingkat I, III D, Tahun 1997
- Pembina, IV A, Tahun 2001

7. Riwayat Jabatan Fungsional:
 - Asisten Ahli madya, Tahun 1988
 - Asisten Ahli, Tahun 1991
 - Lektor Muda, Tahun 1994
 - Lektor Madya, Tahun 1997
 - Lektor, Tahun 2001,
 - Lektor Kepala, Tahun 2001,
 - Guru Besar, Agustus 2010
8. Riwayat Jabatan Struktural :
 - Kepala Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNDIP : 2000 – 2003
9. Pengalaman Organisasi:
 - Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda, 1989 – 1991
 - Ketua bidang pendidikan Pusat Studi Wanita Undip, 1991-1993
 - Anggota Kelompok Kajian Hukum dan Wanita, Fak Hukum Undip
 - Dewan Pakar Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Transformatif (PPKHT), Semarang
 - Anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, 1994 – 1998
 - Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 1994 –
 - Ketua Pusat Studi Keamanan Negara, 2003 - 2005
 - Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Kota Semarang : 2000 – 2005.
 - Anggota Komite Pemantauan Pemilihan Gubernur (KP2G) Propinsi Jawa Tengah : 2002 – 2005.
 - Asian Law Student Association Undip Advisor : 2000 – 2006.
 - Anggota Kompolnas, 2006 – Sekarang.
 - Dosen Profesional, Sertifikat Pendidik No.091100805649, Departemen Pendidikan Nasional, 2009
10. Tanda Jasa/Penghargaan :
 - Satyalancana Dwidya Sistha, MABES POLRI/HANKAM, 1992
 - Dosen Teladan I Fak. Hukum UNDIP, 1999
 - Satyalancana Karya Satya 10 tahun, Presiden RI, 2002
 - Dewan Juri Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) Nasional Bidang Hukum, UNS, 2008
 - Satyalancana Karya Satya 20 tahun, Presiden RI, 2010
11. Mitra Bestari
 - Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
 - Jurnal Aequitas Iuris, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang NTT.
 - Editorial Board Hirodai, Japan-Undip of Law and Political Review.
 - Pemimpin Umum Majalah Suara Kompolnas.

12. Partisipasi Dalam Pertemuan Akademik

- 1987 : Workshop " Gender and Power", KITLV Rijk University, Leiden, Nederland.
- 1988 : Lokakarya "Wanita dalam Pembangunan", Kerjasama Indonesia-Belanda, Universitas Brawijaya, Malang.
- 1989 : Lokakarya "Wanita dalam Pembangunan", Kerjasama Indonesia-Belanda, Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- 1990 : Workshop "Women's Right as Human Right", War on Want, London.
- 1993 : Workshop "Gender and Empowerment", Flinders University, South Australia.
- 1994 : Delegasi RI dalam Konferensi Asia Pasific Tingkat Menteri II Mengenai Wanita Dalam Pembangunan, Convention Hall, Jakarta.
- 1995 : Workshop on "Tourism, Culture, and Economics", Griffith University, Brisbane, Queensland, Australia.
- 1996 : "The Sixth International Interdisciplinary Congress on Women", Adelaide, South Australia.
- 1999 : Tim Penyusun Sumbang Saran GBHN 2000, Kerjasama PU-Undip.
- 2005 : Narasumber Kelompok Kerja Penyusunan "Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI", Mabes POLRI.
- 2008 : "Legal Education And The Global Changes", Benchmarking, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand.

13. Karya Ilmiah

NO	JUDUL	KETERANGAN
	Karya Ilmiah Yang Dipresentasikan	
1.	Pembahasan RUU Polri : Sebuah Sumbang Saran	Diskusi RUU Polri, FH Undip, Semarang, 12 April 1996
2.	Usulan Rancangan GBHN Bidang Hukum : Reformasi Hukum dan Pewujudan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Curah Pendapat Usulan Rancangan GBHN, Undip, Dep. PU, Jakarta, 27 September 1999
3.	<i>Iron Fist and Velvet Glove</i> : Paramilitarisme di dalam Perpolisian Ketertiban Umum	Diskusi Pusat Studi Kepolisian (PSK), FH Undip, Semarang, 20 Nopember 1999
4.	Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Lintasan Sejarah : Dulu dan Kini, Di sana dan Di sini	Pelatihan untuk Pelatih (<i>Training of Trainer</i>), Dewan Riset dan Pembangunan Jawa Tengah (DRPJT), Semarang, 1 Des. 1999
5.	Selayang Pandang Pluralisme	Kajian Ilmiah ICMI, Semarang, 19 Des. 1999

6.	Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hukum	Seminar HAM dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Sosiologi, Pemuda Muhammadiyah dan KNPI Jateng, Semarang, 24 Desember 1999
7.	Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum di Indonesia	Dialog dan Buka Bersama Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Semarang, 30 Desember 1999
8.	Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 2001 – 2005 Bidang Hukum	Curah Pendapat Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, BAPPEDA Propinsi Jateng, Semarang, 27 Maret 2000
9.	Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Masyarakat Madani	Serial Lokakarya Membangun Kebersamaan DPRD, Pemerintah Daerah, ORPOL/ORMAS, Akademisi, LSM Kabupaten Kudus, Kudus, 9 Mei 2000
10.	Kamtibmas dan Komunisme	Diskusi Pemuda Muhammadiyah, Semarang, 11 Mei 2000
11.	Reformasi Pendidikan	Seminar Kependidikan II Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 10 Juni 2000
12.	Selayang Pandang Anarkisme	Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) SMPT STMIK Dian Nuswantoro, Semarang, 18 Juni 2000
13.	Pengantar Ilmu Hukum / Pengantar Hukum Indonesia	Matrikulasi Magister Ilmu Hukum (S2), Program Pasca Sarjana, Unissula, Semarang, 28 Agustus 2000
14.	Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Masyarakat Madani	Maperca HMI Komisariat Hukum, UNDIP, Semarang, 13 September 2000
15.	HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Diskresi Polisi	Pelatihan HaKI Klinik HaKI, FH Undip, Semarang, 16 Oktober 2000
16.	Paradigma : Jatidiri Cendekia	Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Undip, Semarang, 1 Nop. 2000

17.	Menjadi Manusia Merdeka : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani	Orasi Ilmiah, Dies Natalis ke 44 FH Undip, Semarang, 8 Januari 2001
18.	Perlindungan Bagi Polisi dari Tindak Kekerasan Kolektif : Bagaimana Semestinya	Seminar Perlindungan Terhadap Polisi dari Tindak Kekerasan Kolektif, Akpol, Semarang, 19 Mei 2001
19.	Sistem Hukum Indonesia : Pilar, Cita, dan Citra	Serial Dialog Interaktif Menuju Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>), <i>Institute for Social and Ethics Studies</i> (ISES) dan The Habibie Centre (THC), Semarang, 4 Juni 2001
20.	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Seminar Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, BP MPR RI dan Undip, Semarang, 8-9 Juni 2001
21.	Membuka Jalan, Mengaburkan Pandangan : Resensi Buku "Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik: Tafsir Sosial Hukum PPAT – Notaris Ketika Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik"	Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Undip, Semarang, 18 Juli 2001
22.	Penelitian, Pengembangan Program, dan Evaluasi / Monitoring Berperspektif Gender	Pelatihan Advokasi Perencanaan Strategi dan Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Gender, Puslit Gender, Lemlit, Undip, Semarang, 23 – 25 Agustus 2001
23.	Sumbangan Pemikiran Umum terhadap Draft 2 RANTAP MPR tentang Rekomendasi Kebijakan bagi Pemberantasan KKN	Diskusi Masukan Rantap MPR Pemberantasan KKN, BP MPR RI, Undip, Semarang, 2 September 2001
24.	Matra Kekuasaan, Otoritas, Diskresi, dan Akuntabilitas Kepolisian (MAT KODAK): Suatu Tinjauan Filsafati terhadap Polisi, Hukum, dan Demokrasi	Seminar Nasional Konfigurasi Kepolisian Republik Indonesia Di Tengah Kegaduhan Politik, Padang, 27 September 2001
25.	Sumbang Saran Bagi Perubahan Naskah Lengkap UUD 1945 Dan Rancangan Perubahan UUD 1945 Sesuai Dengan Lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001	Diskusi Sumbang Saran Perubahan UUD 1945, BP MPR RI, Undip, Semarang 7 – 8 Maret 2002
26.	Pembahasan "The Chaotic Indeterminacy of Tort Law : Between Formalism and Nihilism"	Seminar Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Undip, Semarang, 2 Mei 2002

27.	Kontribusi Paradigma Konstruktivisme bagi Pemahaman Hukum di Indonesia : Tanggapan terhadap Buku "Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum"	Seminar dan Bedah Buku 'Eklektisisme Hukum Nasional', Qodri Azizy, IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2002
28.	Etika Pengasuhan dan Budi Pekerti Bagi Taruna Akademi Kepolisian	Penataran Pola Pengasuhan terhadap Para Pengasuh / Perangkat Batalyon Taruna/ Taruni, Batalyon Siswa, dan Ketua Tim Instruktur, Akpol, Semarang, 24 Juni 2002
29.	Sepuluh (10) Butir Etika Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian	Penataran Pola Pengasuhan Taruna/Taruni/ Siswa Akpol, Semarang, 17 Juli 2002
30.	Berpaling Ke Lain Hati, Temukan Jati Diri: Suatu Retrospeksi Filsafati tentang Perpolisian di Beberapa Negara Dalam Rangka Membangun Perpolisian Indonesia	Seminar Regional Pergeseran Visi dan Kebijakan POLRI di Era Reformasi, UNNES, Semarang, 23 Juli 2002
31.	Terapung Tak Hanyut, Terendam Tak Basah: Suatu Telaah Filsafati tentang Pemisahan POLRI dari TNI dan Peran Polisi sebagai Penegak Hukum	Seminar Pemisahan POLRI dari TNI dan Optimalisasi Perannya dalam Penegakan Hukum Pidana, Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 3 Agustus 2002
32.	Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif	Seminar Menyongsong RUU Hukum Islam, MUI Jawa Tengah, Bandung, 28 Okt. 2002
33.	Buah Simalakama Kaki Lima: Refleksi Filsafati tentang Pengelolaan Ruang Publik Dalam Rangka Membangun Semarang sebagai Kota Sadar Kamtibmas	Seminar Dewan Pertimbangan dan Perencanaan Kota (DP2K) Semarang, Semarang, 5 Januari 2003
34.	Reformasi Pertanahan di Indonesia	Dialog Interaktif Masalah Pertanahan, TVRI, Semarang, 7 Januari 2003
35.	Sketsa Dinamika Politik Lokal Pemilihan Gubernur Jawa Tengah : Kelebihan dan Kelemahan Hukum dalam Pilkada	Panel Diskusi <i>Launching</i> Komite Peduli Pemilihan Gubernur (KP2G) Jawa Tengah, Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah, Semarang, 20 Januari 2003
36.	Demokrasi dan Kekerasan : Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum	Diskusi Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Presidium Wilayah Jawa Tengah, Unika Soegijopranoto, Semarang, 1 Maret 2003

37.	Konstruktivisme adalah Kita : Sebuah Sumbangan Pemikiran	Diskusi Curah Pendapat Penerbitan Buku "Visi Baru Kehidupan", Unika Soegijopranoto, Semarang, 23 April 2003
38.	Revitalisasi Kraton Surakarta melalui Kelompok Sadar Kamtibmas	Penandatanganan MOU Polda Jateng dan Kraton Kasunanan Surakarta, Sukarta, 16 Juni 2003
39.	Membangun Keamanan Mensejahterakan Masyarakat	Peresmian Pembentukan Pusat Studi Keamanan Negara (PSKN), Semarang, 13 Agustus 2003
40.	Community Policing dan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK)	Pembentukan KSK, Poltabes Semarang, Semarang, 2 Oktober 2003
41.	Asean Law Students' Association (ALSA) dan Globalisasi	Simulasi dan Pengenalan ALSA, Undip, Semarang, 4 Oktober 2003
42.	Bertemu Ruas dengan Buku : Menelusuri Benang Merah antara Gagasan Fritjof Capra dan Konstruktivisme	Diskusi Visi Baru Kehidupan Fritjof Capra, Unika Soegijopranoto, Semarang, 11 Oktober 2003
43.	Community Policing dan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK)	Pembentukan KSK, Polwil Pekalongan, Pekalongan, 20 Oktober 2003
44.	Community Policing dan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK)	Pembentukan KSK, Polwil Surakarta, Surakarta, 10 November 2003
45.	Community Policing dan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK)	Pembentukan KSK, Polres Sukoharjo, Sukoharjo, 24 Nopember 2003
46.	Community Policing dan Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK)	Pembentukan KSK, Polres Karang Anyar, Karang Anyar, 4 Desember 2003
47.	Tumbuh Pada Alur Sudah Diturut, Tumbuh Pada Jalan Sudah Ditempuh: Sumbangan Pemikiran Pemantapan Kemandirian Polri	Diskusi Mencari Solusi Menghindari Konflik antara TNI dan Polri, Mapolda Jateng, Semarang, 16 Desember 2003
48.	Mahasiswa : Bukan <i>Panacea</i>	Diskusi dan Telaah Masalah Sosial, BEM FH Undip, Semarang, 17 Desember 2003
49.	Community Policing dan Filsafat Perpolisian	Ceramah / Kuliah Sespati Polri Dikreg VI T.P., Lembang, Bandung, 1 Maret 2004
50.	Bedah Buku "Putusan Perkara Akbar Tanjung : Analisis Yuridis Para Ahli Hukum"	Bedah Buku "Putusan Kasasi Akbar Tinjauan Yuridis", Semarang, 15 April 2004

51.	DPRD : Dulu, Kini, dan di Masa Mendatang	Diskusi Sarasehan DPRD Dulu, Kini & Mendatang (Evaluasi dan Prospek), Semarang, Senin, 26 April 2004
52.	Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat : Suatu Kajian Filsafat Hukum	Seminar Nasional Aksesibilitas Pelayanan Publik : Upaya Menuju Kemandirian Penyandang Cacat di Era Otonomi dan Globalisasi, Semarang, 22 Mei 2004
53.	Ayam Kampus : Sebuah Telaah Filsafat Hukum	Talk Show Fenomena Ayam Kampus, Kelompok Studi Bahasa Asing (KSBA), Semarang, 31 Mei 2004
54.	Mengembangkan Ilmu Kepolisian dan <i>Community Policing</i> : Sumbangan Pemikiran Pembangunan Polisi Sipil	Diskusi tentang Polisi Sipil, Mapolda Jateng, Semarang, 27 Juli 2004
55.	Polisi dan Akuntabilitas	<i>Workshop</i> tentang Transparansi dan Akuntabilitas Polri dalam <i>Training of Trainers</i> , Polda Kaltim dan Pusat Kajian dan Layanan Hukum, FH Uniba, Balikpapan, 6 Sep. 2004
56.	<i>Community Policing</i> dan Pengejawantahannya di Polda Jateng	Seminar Nasional Urgensi <i>Community Policing</i> dalam Agenda Reformasi Kepolisian, Denpasar, 8 Oktober 2004
57.	Menata kembali Kawasan Simpang Lima dan Pendidikan Biaya Murah di Semarang	Seminar Dewan Pertimbangan dan Perencanaan Kota (DP2K) Semarang, Semarang, 27 Oktober 2004
58.	Pengantar Ilmu Kepolisian	Matrikulasi Taruna/Taruni Den 39, Akpol, Semarang, 29 Oktober 2004
59.	Dinamika Pembangunan dan Pemahaman Hukum di Cina : Sebuah Pelajaran Buat Kota Semarang	Seminar Dewan Pertimbangan dan Perencanaan Kota (DP2K) Semarang, Semarang, 17 Januari 2005
60.	Paradigma : Apa dan Bagaimana	Kuliah Perdana Kemahiran Non Litigasi, FH Undip, Semarang, 1 April 2005
61.	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa FH Undip, Semarang, 2 April 2005
62.	Padi Masak, Jagung Mengupih : Membangun <i>Community Policing</i> , Mewujudkan <i>Civil Society</i>	Seminar <i>Community Oriented Policing</i> , Percik, Salatiga, 15 April 2005

63.	Advokasi dan <i>Lobbying</i>	LKMM, Fakultas Kedokteran Undip, Semarang, 10 Feb. 2007
64.	<i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) dan Perubahan Paradigmatik	Forum Diskusi Mabes Polri tentang ADR, Jakarta, 28 Februari 2007
65	Evaluasi Reformasi Polri	Diskusi Panel Alumni PTIK – VII bekerja sama dengan Kompas, "Problematisasi Soal Profesionalitas Polisi", Jakarta, 18 Juli 2008
66.	Diskresi dan Paradigma	Seminar Nasional Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesionalisme Polisi, Semarang, 25 November 2008
67.	Organisasi dan Permasalahannya	Studium Generale 2008, BEM KM Dept PSDM UNDIP, 5 Desember 2008
68.	Polisi dan Moralitas : Suatu Kajian Filsafat Hukum	Seminar Strategi Membangun Komitmen Guna Mewujudkan Polisi yang Bermoral UNY - Sespim, Yogyakarta, 7 Pebruari 2009
69.	<i>Policing with Love</i> dalam konteks <i>Community Policing as Democratic Policing</i>	Seminar <i>Policing with Love</i> Polda Jateng, Semarang, 3 Maret 2009
70.	Counselling: Suatu Pengantar	Seminar "Guruku Sahabat Terbaikku", Majalah Psikologi Plus, Semarang, 2009
71.	Kompolnas dan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat	Konsultasi Publik dalam rangka Penanganan Saran dan keluhan Masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian di Polda NAD, Sumut, NTB, NTT, Agustus – Oktober 2009
72.	Hukum, Keadilan, dan Keberagaman Penafsiran : Suatu Tinjauan Paradigmatik	Seminar Nasional 'Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Penegak Hukum dan Masyarakat', Unswagati, Cirebon, 13 Januari 2010
73.	Manajemen/Pengelolaan Konflik	Latihan Ketrampilan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Dasar Fakultas Kedokteran Undip, 29 Mei 2010

74.	Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan POLRI yang Profesional dan Mandiri	Seminar Nasional dan Lokakarya "Urgensi Pemberantasan Mafia Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", BEM Fakultas Hukum UNDIP, 5 Juni 2010
75.	Mafia Hukum dalam Lingkup Kepolisian: Sebuah Tinjauan Filsafati	Seminar Nasional "Hukum Dan Deklarasi Mahasiswa Anti Mafia Hukum", Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Jakarta, 28 Juni 2010
76.	Mengembangkan Peran Masyarakat dalam POLMAS	Sarasehan Tokoh Lintas Agama, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 15 Juli 2010
77.	Reformasi Birokrasi POLRI dan Implementasinya	Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespin) POLRI, 21 September 2010
78.	Kompolnas dan Pengawasan terhadap Kinerja Polri	Focus Group Discussion dalam rangka Penelitian tentang Evaluasi Reformasi Polri, di Polda Kepri, Kalsel, Bali, NTT, Agustus – Oktober 2010

NO	JUDUL	KETERANGAN
	Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Sebagai Artikel di Dalam Surat Kabar	
1.	Polisi Yang Diwanitakan	Suara Merdeka, 21 April 1988
2.	Dharma Wanita dan Pembangunan Wanita	Suara Merdeka, 7 Agustus 1988
3.	Gerakan Feminisme Bukan Biang Keladi Kejahatan Wanita	Suara Pembaruan, 16 Pebruari 1989
4.	Polisi Wanita : Suatu Retrospeksi	Suara Merdeka, 2 September 1991
5.	Wanita Bianglala Lingkungan	Suara Merdeka, 19 Desember 1991
6.	Permasalahan Wanita Indonesia : Karier, Organisasi, dan Rumah Tangga	Suara Merdeka, 22 April 1992
7.	Polisi Wanita dalam Polri	Suara Merdeka, 21 Mei 1993
8.	Polwan di Persimpangan Jalan	Suara Merdeka, 1 September 1993
9.	Polisi Wanita dalam Realita	Republika, 1 September 1993
10.	Polwan : Suatu Retrospek dan Prospek	Suara Merdeka, 1 September 1995

NO	JUDUL	KETERANGAN
	Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Sebagai Artikel di Dalam Jurnal Ilmiah	
1.	Tindak Pidana Kejahatan dan Kenakalan Yang Dilakukan Wanita	Majalah FH Undip, Masalah Hukum, No. 2 1989, ISSN : 0126 – 1389
2.	Tinjauan Filsafati Perjanjian Jual – Beli dengan Hak Membeli Kembali	Majalah Hukum IKAHI, Varia Peradilan, Th. IV, No. 47, Agustus 1989 ISSN : 0215 – 0247
3.	Women In Indonesian Law	Vena Newsletter. University of Leiden, The Netherlands. 1989.
4.	The Competitiveness of Female Labour In Word Market Industries : The Indonesian Case	OECONOMIC, Student's Bulletin of Economic Development Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherland. 1990.
5.	Tugas Polisi dan Kepuasan Masyarakat	Majalah Sespim Polri Sanyata Sumanasa Wira, No. 16, Th. VII, 1993
6.	Kajian terhadap Kejahatan Perkosaan	Majalah FH Undip, Masalah Hukum, No. 4 1993, ISSN : 0126 – 1389
7.	Peranan Wanita dalam Pengembangan Nasional dalam Era Globalisasi	Majalah FH Undip, Masalah Hukum, No. 11 1994, ISSN : 0126 – 1389
8.	Pancasila dan Ilmu Hukum	Majalah Triwulanan FH Univ. Brawijaya, Arena Hukum, No. 2, Th. XIX, September 1994 ISSN : 20126 – 0235
9.	Dilema Polisi Wanita Dalam Polri	Nuansa Indonesia, Media Komunikasi di South Australia, 1 (1), Nopember 1996
10.	<i>Law and Religion</i>	Jurnal Kelompok Pengajian Perhimpunan Pelajar Indonesia di Adelaide, South Australia, Australia, Qiyas, 1997.

11.	'The Public and the Police: A Case Study of Community Policing in Semarang, Indonesia'	Jurnal Ilmiah PPIA <i>Nuansa</i> , 1 (1), 1997
12.	'From Community to Democratic Policing: The Dynamics of Law and Order in Semarang, Indonesia'	Jurnal Ilmiah PPIA <i>Nuansa</i> , 1 (2), 1997
13.	Memahami Kembali Hak Asasi Manusia	Majalah FH Undip, Masalah Hukum, No. 4 1997, ISSN : 0126 – 1389
14.	<i>Stings Like A Bee and Dances Like A Butterfly: The Police and The Changing Law and Politics in Indonesia in The Dutch Colonial Era</i>	Majalah Ilmiah FH Undip, Masalah-Masalah Hukum, Edisi III / Oktober – Desember 1998, ISSN : 0216 – 1389
15.	<i>The Pandora's Box Is Open: Developing KAMTIBMAS in Indonesia</i>	UNDIP News Letter, 1998
16.	Menjadi [Polisi] Indonesia : Membanding Ke Luar, Membangun Ke Dalam, dan Berpaculah	Majalah ilmiah AKPOL, Swara Tanggon Kosala, April 1999
17.	<i>Women in Indonesian Politics</i>	UNDIP News Letter, 2000
18.	<i>Land Tenure : A Legal Philosophical Framework of Land and People</i>	<i>International Journal</i> FH Undip dan Fac. of. Law Hiroshima Univ. <i>Hirodai – Undip of Law and Political Review</i> , Spec. Edition, March 2001, ISSN : 0854 – 445X
19.	HaKI dan Diskresi Polisi	Majalah ilmiah AKPOL, Swara Tanggon Kosala, April 2001
20.	<i>Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan dalam rangka Membangun Masyarakat Madani</i>	Majalah Ilmiah FH Undip, Masalah-Masalah Hukum, Vol. XXX, No. 3, Juli – Sep. 2001, ISSN : 0216 – 1389, SK Akreditasi Dirjen Dikti No. : 395/DIKTI/Kep/2000
21.	<i>Constructivism : A Contribution to the Philosophy of Education</i>	<i>International Journal</i> IAIN, Ihya 'Ulum al-Din, Vol. 3, No. 2, December 2001, ISSN : 1411 – 3708
22.	Selayang Pandang "Critical Theory, Critical Legal Theory Studies, dan Critical Legal Studies"	Majalah Ilmiah FH Undip, Masalah-Masalah Hukum, Vol. XXXI, No. 3, Juli – Sep. 2002, ISSN : 0216 – 1389, SK Akreditasi Dirjen Dikti No. : 395/DIKTI/Kep/2000

23.	Bagai Dawat Dengan Kertas, Bagai Aur Dengan Tebing: Sebuah Kajian Politik Hukum Posmodern terhadap Relasi antara Interpretasi dan Pemahaman	Majalah Ilmiah FH Unsoed, Dinamika Hukum, Vol. 3, No. 2, Mei 2003, ISSN : 1410 – 0797
24.	<i>The Prospect of An Equivocal International Feminism : Reproductive Rights and Abortion Problems</i>	<i>International Journal</i> FH Undip dan Fac. of. Law Hiroshima Univ. Hirodai – Undip of Law and Political Review, Spec. Edition, Dec. 2004, ISSN : 0854 – 445X
25.	Peran Potensi, Kompetensi, dan Performansi Polri dalam Penegakan Hukum	Jurnal Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula <i>Khaira ummah</i> , Vol. II, No. 1, Maret 2007, ISSN : 1907 – 3119
26.	Diskresi dan Paradigma	Jurnal Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula <i>Khaira ummah</i> , Vol. II, No. 2, September 2007, ISSN : 1907 – 3119
27.	Komparasi Paradigmatik Berbagai Aliran Filsafat Hukum : Suatu Kajian Literatur	Laporan Penelitian Majalah Ilmiah FH Unissula, Jurnal Hukum, Vol. XVII, No. 3, September 2007, ISSN : 1412 – 2723, SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26 Dikti/KEP/2005
28.	Komparasi Berbagai Aliran Hukum dan Ekonomi : Suatu Kajian Filsafat Hukum	Laporan Penelitian Majalah Ilmiah FH Undip, Masalah-Masalah Hukum, Vol. XXXVII, No. 2, Juni 2008, ISSN : 0216 – 1389
29.	Membangun Profesionalisme dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi	Majalah Ilmiah Kopolnas, Suara Kopolnas, Vol. I, No. 1, Januari - Maret 2009

NO	JUDUL	KETERANGAN
	Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Sebagai Bagian Sebuah Buku	
1.	<i>Quo Vadis</i> Pendidikan Hukum : Suatu Renungan bagi Paradigma 'Baru' Hukum	Dalam Buku "Wajah Hukum di Era Reformasi : Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000, ISBN : 979 – 414 – 837 – 7
2.	Buah Simalakama Kaki Lima : Refleksi Filsafati tentang Pengelolaan Ruang Publik Dalam Rangka Membangun Semarang sebagai Kota Sadar Kamtibmas	Dalam Buku "Refleksi Akhir Tahun 2002 dan Antisipasi Tahun 2003 Pembangunan Kota Semarang", Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, 2002
3.	Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah	Dalam Buku "Pilkada di Era Otonomi : Berlayar Sambil Menambal Lubang Di Kapal", Penerbit C.V. Aneka Ilmu, 2003
4.	Bertemu Ruas dengan Buku	Dalam Buku "Menelusuri jejak Capra : Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, Agama, Penerbit Kanisius, 2004, ISBN : 979 – 21 – 0993 – 5
5	Penguatan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mendorong Reformasi Paradigmatik POLRI	Dalam buku "Potret Penegakan Hukum Di Indonesia", Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009

NO	JUDUL	KETERANGAN
	Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan Sebagai Buku	
1.	<i>The Enhancement of Women's Role for Development: A Legal Study of Indonesia</i>	Badan Penerbit Undip, 1997 ISBN : 979 – 8949 – 45 – 5
2.	Diskresi Polisi	Badan Penerbit Undip, 2000 ISBN : 979 – 9156 – 57 – 2
3.	Kekuasaan, Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian : Suatu Pemahaman dan Penjabaran Baru Tentang Hukum Kepolisian	Badan Penerbit Undip, 2003 ISBN : 979 – 704 – 138 – 7
4.	Ilmu Kepolisian : Suatu Pengantar	Badan Penerbit Undip, 2003 ISBN : 979 – 704 – 139 – 5
5.	Dasar-Dasar Pemikiran Arah Kebijakan Polri	Badan Penerbit Undip, 2008 ISBN : 978 – 979 – 704 – 686.6
6.	Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum Membangun Masyarakat Madani	Badan Penerbit Undip, 2008 ISBN 987 – 979 – 704 – 610 – 1
7.	Paradigma dan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum	Badan Penerbit Undip, 2009 ISBN 978 – 979 – 704 – 765 – 8